

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

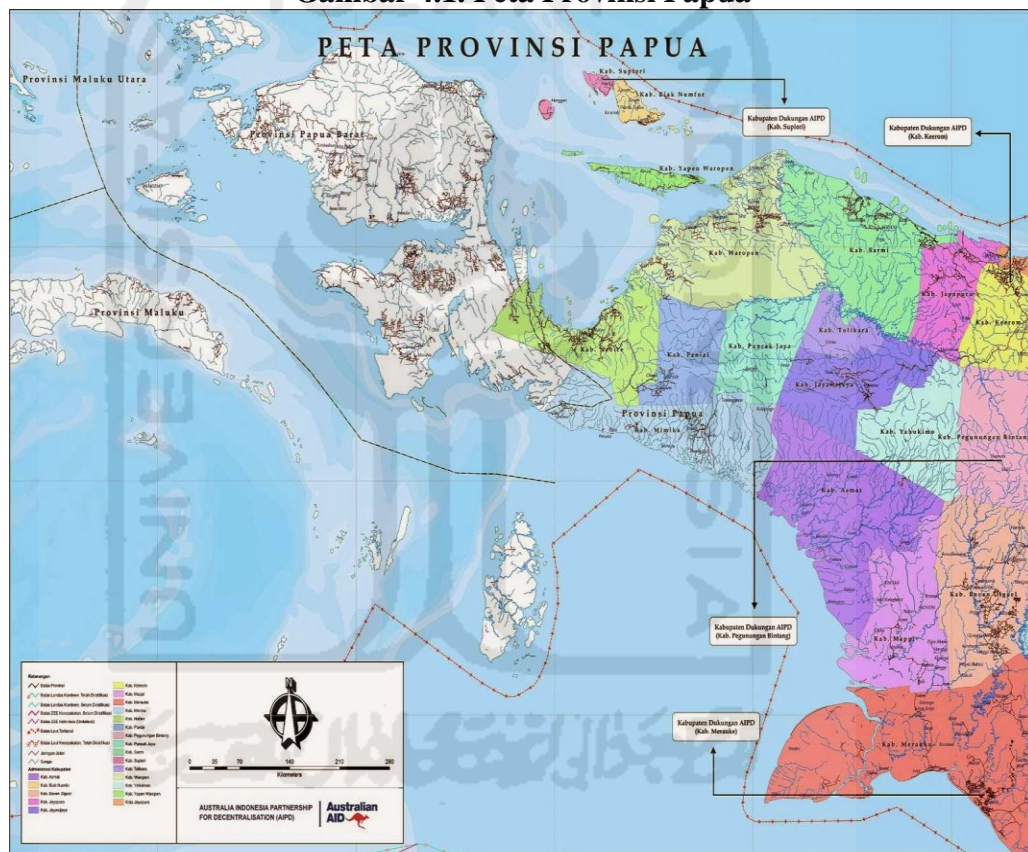
A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Administratif Provinsi Papua

Provinsi Papua terletak pada posisi 2,25°-9° Lintang Selatan dan 130°-141°

Bujur Timur.

Gambar 4.1. Peta Provinsi Papua



Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, <https://papua.go.id>

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Papua Bagian Barat (dulu Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi

menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Pulau Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.¹

Utara : Samudera Pasifik

Selatan : Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia

Barat : Papua Barat, Kepulauan Maluku

Timur : Papua Nugini

Provinsi Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi

¹ Pemerintahan Provinsi Papua, "Sekilas Provinsi Papua", dikutip dari <https://papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html> pada hari Senin, 16 Januari 2017, pukul. 11.00 WIB

hingga tahun 2002. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamankan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.²

Secara administratif Provinsi Papua terbagi dalam 29 wilayah pemerintahan, dengan 28 kabupaten dan 1 kota dengan 470 kecamatan dan 4.373 desa/kelurahan.

Tabel 4.1. Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2015.

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Merauke	20	168
2.	Jayawijaya	37	312
3.	Jayapura	19	144
4.	Nabire	15	85
5.	Kepulauan Yapen	14	145
6.	Biak Numfor	19	262
7.	Paniai	10	70
8.	Puncak Jaya	26	302
9.	Mimika	12	86
10.	Boven Digoel	20	112
11.	Mappi	15	162
12.	Asmat	19	211
13.	Yahukimo	51	518

² *Ibid.*

14.	Pegunungan Bintang	34	277
15.	Tolikara	48	549
16.	Sarmi	18	102
17.	Keerom	7	61
18.	Waropen	10	108
19.	Supiori	5	38
20.	Mamberamo Raya	9	59
21.	Nduga	8	32
22.	Lanny Jaya	10	143
23.	Mamberamo Tengah	5	59
24.	Yalimo	5	27
25.	Puncak	8	80
26.	Dogiyai	10	79
27.	Intan Jaya	6	78
28.	Deiyai	5	67
29.	Kota Jayapura	5	39
Provinsi Papua		470	4 375

Sumber : BPS Provinsi Papua 2015.(diolah)

Data kecamatan dan desa di masing-masing kabupaten dan kota pada tabel 4.1., menunjukkan bila kabupaten Tolikara adalah wilayah yang paling banyak pembagian desanya. Dengan total 549 desa tersebar di 48 kecamatan. Sedangkan Yohukimo kabupaten dengan kecamatan terbanyak yakni 51 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 518.

2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dalam angka, tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Papua telah mencapai 2.915.263 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami penambahan pada

2012 yaitu 2.973.838 jiwa atau bertambah 58.575 jiwa, bila dipresentasikan hanya 0,497 persen. Begitu pula pada 2013 total penduduk Papua 3.032.488 jiwa, bertambah 58.650 jiwa. Tahun 2014 jumlah penduduk 3.091.047 jiwa dan 2015 penduduk Papua berjumlah 3.149.375 jiwa. Sehingga dari tahun 2011 sampai 2015, penduduk Provinsi Papua mengalami penambahan penduduk 234.112 jiwa.³Rata-rata pertambahan penduduk di Papua cenderung naik setiap tahunnyadiangka 46.822 jiwa dari total penduduk yang ada.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2015

Kabupaten	Jumlah Penduduk Provinsi Papua				
	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	201.786	205.881	209.980	213.484	216.585
Jayawijaya	198.978	201.094	203.085	204.112	206.320
Jayapura	114.509	116.475	118.789	119.383	121.410
Paniai	132.283	134.583	137.283	137.776	140.178
Puncak Jaya	85.010	86.628	88.187	89.994	91.404
Nabire	130.089	132.392	135.080	135.831	139.171
Mimika	155.481	158.099	161.324	162.489	164.280
Kepulauan Yapen	104.896	107.802	112.010	113.280	115.310
Biak Numfor	187.779	191.608	196.401	199.311	201.677
Boven Digoel	57.997	59.320	60.403	61.283	63.020
Mappi	84.413	86.419	88.006	89.790	91.876
Asmat	81.398	83.322	85.000	86.614	88.578
Yahukimo	168.706	171.608	175.086	178.193	181.326
Pegunungan Bintang	66.900	67.885	69.304	70.697	71.710
Tolikara	119.386	122.916	125.326	127.526	131.323
Sarmi	34.104	34.801	35.508	35.787	36.797
Keerom	49.884	50.703	51.772	53.002	53.694
Waropen	25.828	26.400	26.905	27.723	28.395

³ BPS Provinsi Papua, "Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2015" <http://papua.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/14>, pada hari Senin, 16 Januari 2017, pukul. 11.00 WIB.

Supiori	16.318	16.714	16.976	17.288	18.186
Mamberamo Raya	18.971	19.506	19.776	20.514	21.523
Nduga	82.099	84.288	85.894	92.530	94.173
Lanny Jaya	153.921	157.905	161.077	170.589	172.625
Mamberamo Tengah	40.813	41.878	42.687	45.398	46.321
Yalimo	52.623	53.786	54.911	57.585	58.891
Puncak	96.180	98.020	99.926	101.515	103.624
Dogiyai	86.082	87.728	89.327	90.822	92.190
Deiyai	41.820	42.572	43.405	44.812	45.917
Intan Jaya	64.212	65.204	66.516	68.025	69.381
Kota Jayapura	262.797	268.301	272.544	275.694	283.490
Provinsi Papua	2.915.263	2.973.838	3.032.488	3.091.047	3.149.375

Sumber : BPS Provinsi Papua 2015 (diolah)

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa dari 29 wilayah yang terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk paling sedikit hanya 16.318 jiwa pada 2011 dan 2015 berjumlah 18.186 jiwa. Ini berarti lima tahun terakhir penduduk di Supiori bertambah 1.868 jiwa, atau rata-rata dalam setiap tahunnya 374 jiwa. Selain Supiori, kabupaten Mamberamo Raya menempati urutan kedua sebagai wilayah di Papua yang jumlah penduduknya sedikit yaitu 18.971 jiwa pada tahun 2011, dan pada 2015 menjadi 21.532 jiwa. Lima tahun terakhir Mamberamo Raya penduduknya bertambah 2.552 jiwa.

Wilayah dengan populasi penduduk tertinggi di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura dengan jumlah penduduk 283.490 jiwa tahun 2015. Jayapuran di tahun 2011 mempunyai jumlah penduduk 262.797 jiwa, sehingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir penduduk Jayapura bertambah 20.693 jiwa. Kemudian Kabupaten Marauke diurutan ke dua setelah Kota Jayapura. Total

penduduknya pada 2011 sebanyak 201.789 jiwa dan terus bertambah sampai 216.585 jiwa pada 2015. Sehingga pertambahan penduduknya dari 2011-2015 sebanyak 14.799 jiwa. Untuk melihat presentase detail pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota sebagai berikut:⁴

Tabel 4.3. Presentase Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2015

Kabupaten	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	Rata-Rata
Merauke	2,03%	1,99%	1,67%	1,45%	1,79%
Jayawijaya	1,06%	0,99%	0,51%	1,08%	0,91%
Jayapura	1,72%	1,99%	0,50%	1,70%	1,48%
Paniai	1,74%	2,01%	0,36%	1,74%	1,46%
Puncak Jaya	1,90%	1,80%	2,05%	1,57%	1,83%
Nabire	1,77%	2,03%	0,56%	2,46%	1,70%
Mimika	1,68%	2,04%	0,72%	1,10%	1,39%
Kepulauan Yapen	2,77%	3,90%	1,13%	1,79%	2,40%
Biak Numfor	2,04%	2,50%	1,48%	1,19%	1,80%
Boven Digoel	2,28%	1,83%	1,46%	2,83%	2,10%
Mappi	2,38%	1,84%	2,03%	2,32%	2,14%
Asmat	2,36%	2,01%	1,90%	2,27%	2,14%
Yahukimo	1,72%	2,03%	1,77%	1,76%	1,82%
Pegunungan Bintang	1,47%	2,09%	2,01%	1,43%	1,75%
Tolikara	2,96%	1,96%	1,76%	2,98%	2,41%
Sarmi	2,04%	2,03%	0,79%	2,82%	1,92%
Keerom	1,64%	2,11%	2,38%	1,31%	1,86%
Waropen	2,21%	1,91%	3,04%	2,42%	2,40%
Supiori	2,43%	1,57%	1,84%	5,19%	2,76%
Mamberamo Raya	2,82%	1,38%	3,73%	4,92%	3,21%
Nduga	2,67%	1,91%	7,73%	1,78%	3,52%
Lanny Jaya	2,59%	2,01%	5,91%	1,19%	2,92%
Mamberamo Tengah	2,61%	1,93%	6,35%	2,03%	3,23%
Yalimo	2,21%	2,09%	4,87%	2,27%	2,86%
Puncak	1,91%	1,94%	1,59%	2,08%	1,88%
Dogiyai	1,91%	1,82%	1,67%	1,51%	1,73%
Deiyai	1,80%	1,96%	3,24%	2,47%	2,37%

⁴ *Ibid.*

Intan Jaya	1,54%	2,01%	2,27%	1,99%	1,95%
Kota Jayapura	2,09%	1,58%	1,16%	2,83%	1,91%
Provinsi Papua	2,01%	1,97%	1,93%	1,89%	1,95%

Sumber : BPS Provinsi Papua(diolah)

Jika dilihat dari tabel 4.3., berdasarkan presentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua dari 2011-2015, menjelaskan bila kabupaten Nduga yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk tercepat yaitu rata-rata setiap tahunnya mencapai 3,52 persen. Nduga ditahun priode 2013-2014 presentase pertumbuhan penduduknya sangat sangat tinggi 7,73 persendari total penduduk di wilayah itu. Kemudian disusul Mamberamo Tengah dengan presentase rata-rata 3,23 persen. Kabupaten Mamberamo Tengah juga di tahun 2013-2014 presentase pertumbuhan penduduk tertinggi mencapai 6,35persen dari total penduduknya. Dan Kabupaten Mamberamo Raya menjadi tiga besar wilayah yang mempunyai presentase rata-rata pertumbuhan penduduk tinggi yakni 3,21 persen. Sedangkan kabupaten yang mempunyai rata-rata presentase pertumbuhan penduduk terendah yakni Jayawijaya diangka 0,91persen. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jayawijaya ini sangat kecil, terutama pada priode 2013-2014 dengan tingkat pertumbuhan 0,51persen, bahkan tidak menyentu 1 persen dari total penduduknya. Dipriode tahun sebelumnya 2012-2013 pertumbuhanya 0,99persen.

Kemudian Kabupaten Paniai juga termasuk wilayah yang rata-rata pertumbuhan penduduknya sangat kecil 1,46 persen. Dari 2011-2015 priode yang pertumbuhanya sangat kecil yakni priode 2013-2014 dengan presentase 0,36 persen dari total penduduk di Paniai pada tahun tersebut. Kabupaten

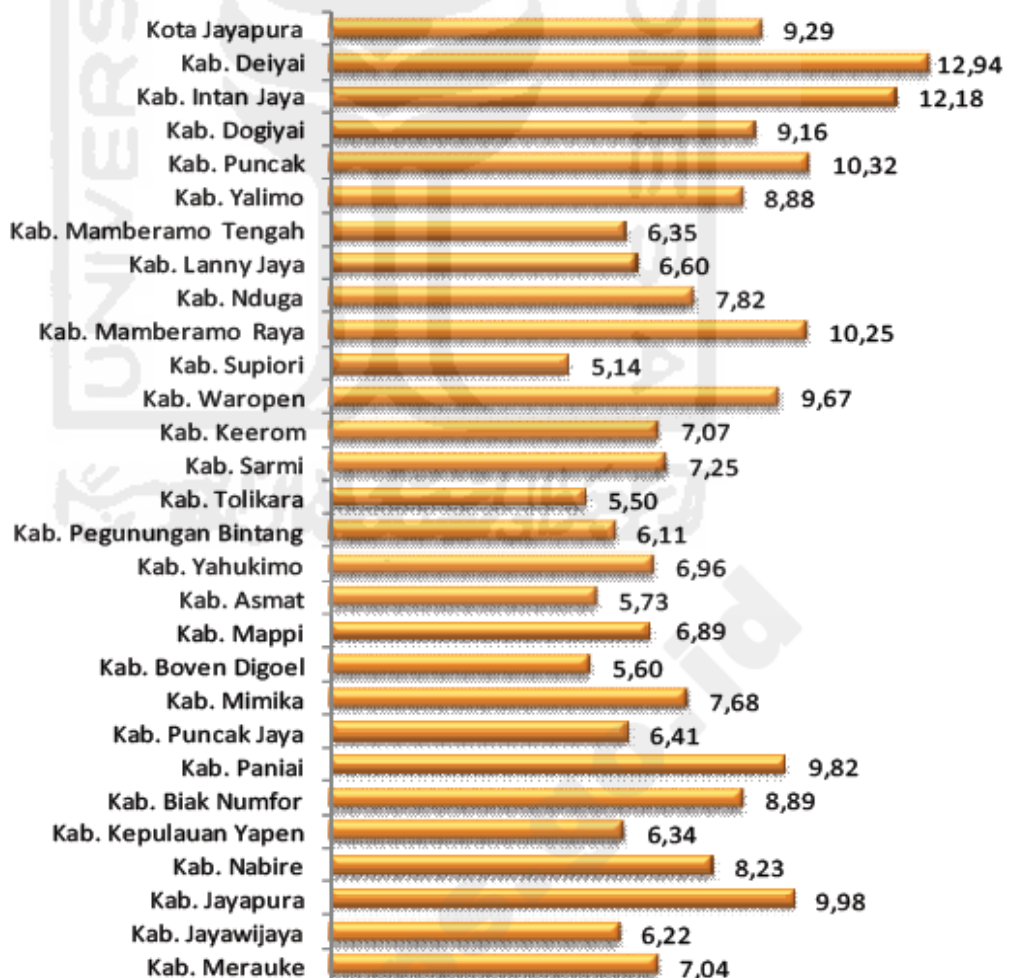
Jayapura menduduki posisi ke-3 untuk kategori presentase pertumbuhan penduduk yang rendah, dengan nilai rata-rata 1,48 persen.

3. Kondisi Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Papua yakni dapat dilihat dari pertambahan keseluruhan nilai produksi barang dan jasa di Papua, dimana kenaikan keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Hal ini terlihat pada PDRB Papua yang merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi dalam jangka 2015.

Grafik 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Papua 2015 (Persen)



Sumber : BPS Nasional

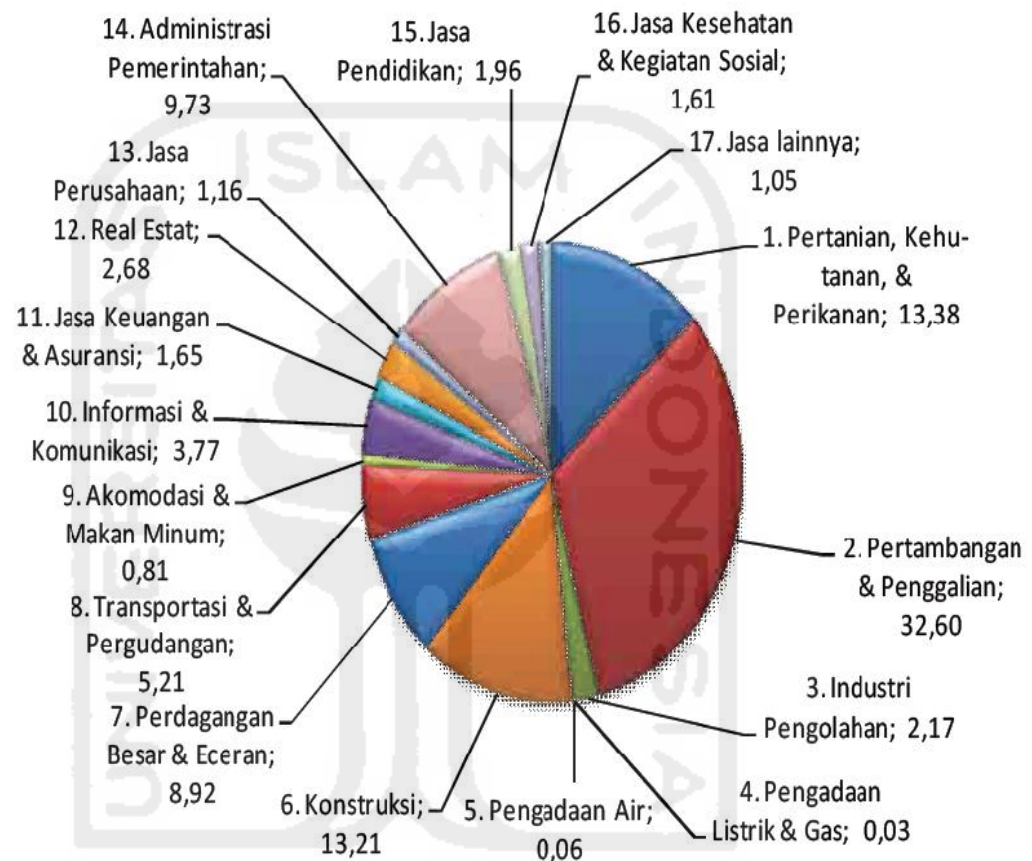
Pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Papua 2015 dapat dilihat pada grafik 4.1., yang menunjukkan bahwa Kabupaten Deiyai adalah wilayah dengan penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan tingkat pertumbuhan diangka 12,94 persen. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Deiyai 2015 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tertekan di angka 4,79 persen, bahkan hampir tiga kali lipatnya rata-rata pertumbuhan nasional 2015. Sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Deiyai yaitu konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kabupaten Intan Jaya juga merupakan memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni 12,18 persen. Sehingga Intan Jaya berada di urutan ke dua setelah Deiyai sebagai wilayah dengan kategori laju pertumbuhan tertinggi. Disusul Kabupaten Puncak 10,32 persen laju pertumbuhan ekonomi 2015. Sementara wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang kecil adalah Kabupaten Supiori diangka 5,14 persen, Tolikara 5,50 persen dan Boven Diogel 5,60 persen. Sedangkan kabupaten lainnya dan kota memberikan laju pertumbuhan ekonomi yang berada dengan kisaran 5,73 persen sampai 10,25 persen. Pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi 2015 di semua kabupaten dan kota Provinsi Papua berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang diangka 4,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga harus melihat struktur perekonomian, sehingga mengetahui sektor apa saja yang mendominasi dan mendorong laju perekonomiannya.

Kondisi perekonomian Provinsi Papua sebagian besar didorong oleh pertambangan dan penggalian yang berlokasi di beberapa wilayah yang ada di Papua. Hal ini terlihat dari struktur perekonomian Papua 2015.⁵

Grafik 4.2. Struktur Perekonomian Provinsi Papua 2015 (Persen)



Sumber : BPS Nasional

Kategori pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Provinsi Papua tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 32,60 persen. Kategori lain yang juga berperan penting dalam perekonomian Papua adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,38 persen, Kategori konstruksi 13,21

⁵ Mirta Dwi Wulandari, dkk., *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015 Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Buku 5*. (Jakarta: PT. Citra Mawan Patamaro, 2016), hlm. 20

persen dan kategori administrasi pemerintahan 9,73 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menyumbang struktur ekonomi di Papua sebanyak 8,92 persen.⁶

Penambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua menarik banyak pekerja pada kegiatan operasional penambangan ataupun usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pertambangan. Sebagai perusahaan tambang terbesar di Papua, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 7.600 karyawan. Dari jumlah tersebut, 26 persen merupakan penduduk lokal Papua. Kondisi sumber daya manusia Papua yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan untuk bekerja menggunakan teknologi modern menjadi kendalanya. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Naik turunnya produksi PT. Freeport Indonesia sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Papua. Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Papua adalah pada ekspor impor. Peningkatan penjualan komoditas pertambangan dari PT Freeport Indonesia menjadi pendorong utama peningkatan ekspor di Provinsi Papua.

Perekonomian daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor impor produk pertambangan. Besarnya kontribusi nilai impor, ekspor, dan konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian Papua, sedangkan investasi yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah kontribusinya berada di bawah ketiga sektor tersebut. Investasi berperan

⁶*Ibid.*

meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi.⁷ Sektor pengadaan listrik dan gas sangat kecil dalam menyumbang angka perekonomian di Papua hanya 0,03 persen. Begitu juga sektor pengadaan air 0,06 dari struktur perekonomian Papua, dan akomodasi makan minum juga sektor terendah diangka 0,81 persen. Ketiga sekto ini sangat rendah dalam pertumbuhan ekonomi di Papua, bahkan tidak menyentuk diangka 1 persen.

b. Kemiskinan

Dari sisi kemiskinan, Provinsi Papua adalah wilayah yang tertinggi jumlah penduduk miskinnya dari 34 provinsi di Indonesia, dengan angka kemiskinan 28,17 persen di tahun 2015 dari jumlah penduduk 3.149.375 jiwa. Ini berarti jumlah penduduk miskin di Papua sebanyak 887.179 jiwa.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Miskin Tertinggi Menurut Provinsi (Persen), 2011-2015.

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Papua	31,25	30,66	31,52	27,80	28,17
2.	Papua Barat	31,92	28,2	27,14	26,26	25,73
3.	Nusa Tenggara Timur	21,23	20,88	20,24	19,60	22,58
4.	Maluku	23,00	21,78	19,27	18,44	19,36
5.	Gorontalo	18,75	17,33	18,01	17,41	18,16
Indonesia		12,49	11,96	11,47	10,96	11,13

Sumber : BPS Nasional (diolah)

⁷ Bapenas,. "Perekembangan Pembangunan Provinsi Papua 2014, "<http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/05.%20Anprov%20Papua.pdf>. diakses pada hari Jumat, 20 Januari 2017, pukul 14.00 WIB.

Dari tabel 4.4, dapat dijabarkan lima provinsi tertinggi presentase penduduk miskinnya. Di urutan peratama Provinsi Papua, kemudian Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan ke lima Provinsi Gorontalo.

Tahun 2011 tingkat kemiskinan di Papua diangka 31,98 persen. Ditahun selanjutnya 2012 Papua mampu menekan kemiskinnannya 0,59 persen menjadi 30,66 persen. 2013 mengalami kenaikan lagi sekitar 0,86 persen menjadi 31,53 persen. Namun, 2014 Papua mampu menurunkan presentase kemiskinan 3.72 persen atau menjadi 27,8 persen. Dan 2015 tidak dapat dipungkiri Papua mengalami kenaikan lagi menjadi 28,17 persen naik 0,37 persen. Dapat ditarik kesimpulan tingkat presentase kemiskinan di Papua lebih tinggi dari rata-rata presentase kemiskinan nasional dari 2011 sampai 2015.

Tabel 4.5. Jumlah Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2015.

Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	13.22	12.95	12.33	10.20	11.10
Jayawijaya	39.03	39.05	41.81	39.60	39.48
Jayapura	17.30	17.08	17.58	14.18	14.69
Nabire	30.86	30.65	27.69	23.92	24.37
Kepulauan Yapen	30.76	30.35	29.32	26.39	27.70
Biak Numfor	30.31	29.84	30.28	27.44	27.23
Paniai	37.18	38.69	40.15	36.07	37.43
Puncak Jaya	40.25	38.21	39.92	36.15	37.45
Mimika	20.78	20.09	20.37	16.11	16.20
Boven Digoel	23.52	22.79	23.70	18.87	19.50
Mappi	30.14	29.30	30.35	25.95	26.96
Asmat	32.38	30.57	33.84	29.10	28.48
Yahukimo	42.49	41.98	43.27	39.02	41.26
Pegunungan Bintang	36.23	35.63	37.23	32.78	31.55
Tolikara	37.81	36.30	38	33.27	34

Sarmi	19.42	18.82	17.72	13.32	13.85
Keerom	21.98	21.65	23.23	19.12	15.83
Waropen	36.23	36.63	37.27	32.63	31.41
Supiori	42.73	41.58	41.50	36.65	39.25
Mamberamo Raya	36.38	35.21	34.25	29.86	29.71
Nduga	39.49	38.14	39.69	35.89	35
Lanny Jaya	43.68	42.33	43.79	39.26	41.97
Mamberamo Tengah	43.69	42.84	39.59	35.47	35.54
Yalimo	40.65	39.49	40.33	35.65	35.88
Puncak	40.77	39.38	41.96	37.85	38.74
Dogiyai	30.40	30.08	32.25	29.10	29.10
Intan Jaya	41.53	40.65	42.03	38.16	41.34
Deiyai	46.76	45.93	47.52	44.49	45.74
Kota Jayapura	16.03	15.77	16.19	12.21	12.22
Provinsi Papua	31.25	30.66	31.52	27.80	28.17

Sumber : BPS Papua (diolah)

Jumlah presentase rata-rata kemiskinan di Papua tak lepas dari partisipasi 29 kabupaten dan kota yang ada di wilayah tersebut. Tabel 4.5. memaparkan Kabupaten Deiyai tertinggi presentase kemiskinan di daerah ini, mencapai 45,74 persen tahun 2015. Sangat jauh dari rata-rata presentase kemiskinan di Papua 28,17 persen. Bahkan ditahun 2013 tingkat presentase kemiskinan di kabupaten ini yang tertinggi 47,52 persen. Kemudian disusul kedua tertinggi Lanny Jaya 41,97 persen dan Kabupaten Intan Jaya 41.34 persen ditahun 2015.

Sedangkan yang terendah penyumbang presentase kemiskinan yaitu Kabupaten Marauke 11,10 persen pada 2015, namun naik dari tahun sebelumnya 0,90 persen. Karena Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Marauke pernah memperkecil angka kemiskinan diwilayah tersebut sampai angka 10,20 persen di 2014. Kota Jayapura di angka 12,21 persen pada

2014, di tahun selanjutnya ibu kota di Provinsi Papua ini 12,22 persen, hanya naik 0,1 persen 2015. Meskipun demikian, harunya Pemerintahan Kota (Pemkit) Jayapura harus konsisten menurunkan angka kemiskinan. Karena presentasen naik turun angka kemiskinan ini terjadi dua kali yakni pada 2012 diangka 15,77 persen dan 2013 naik 16,29 persen.

c. Ketenagakerjaan

Dalam analisis ketenagakerjaan, hukum capital atau modal manusia merupakan salah satu faktor penentu produktivitas tenaga kerja, sehingga manusia emudia melukan investasi melalui berbagai bentuk, salah satunya pendidikan sekolah. Imbal hasil privat (rates of retrun) investasi pendidikan sekolah mewaakili tidak lebih dari setengah imbal hasil privat dari keseluruhan modal kerja, sisanya bersal dari pelatihan kerja, keahlian, pengalaman kerja, mobilitas tenaga kerja, maupun kesehatan. Pendidikan yang tinggi masih memberikan imbal hasil privat yang meningkat sejalan dengan peningkatan jenjangnya.

Data Sensus Kesejahteraan Nasional (Sakernas) menunjukkan, 2015 lebih dari separuh angkatan kerja di Papua sebesar 61,60 persen berpendidikan rendah (kurang dari SD), bahkan 33,88 diantaranya tidak atau belum pernah sekolah. Sebesar 13,15 angkatan kerja berpendidikan SLTP, sisanya yaitu 25,25 persen berpendidikan SMA ke atas.⁸

⁸ BPS Papua, . *Laporan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*, (Papua : CV. Mitra Karya Pura.2016) hlm.48

Hal ini cukup menjelaskan mengapa tingkat pengangguran di Papua relatif rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Secara nasional tingkat pengangguran sebesar 6,18 persen, sementara Papua berada pada posisi keempat paling rendah seluruh Indonesia. Kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah pada umumnya tidak memiliki skill atau keahlian khusus sehingga mereka harus tetap bekerja pada lapangan usaha atau jenis pekerjaan apapun untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut didukung oleh data Sakernas yang menunjukkan dominasi pekerja dengan pendidikan rendah sektor pertanian yang tidak membutuhkan keahlian tertentu.

Tabel 4.6. Tingkat Pengangguran Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua 2015.

Pendidikan Yang Diatatkan	Daerah Tempat Tinggal	
	Perkotaan	Perdesaan
Tidak/ belum pernah sekolah	4,27	0,46
Tidak/belum tamat SD	8,72	2,12
SD	6,56	1,06
SLTP	8,00	2,81
SLTA	13,68	8,51
DI/II/III/Akademi/Universitas	9,21	4,87
Total	10,69	2,06

Sumber : Badan Pusat Statistk (BPS) Provinsi Papua

Tabel 4.6. di atas menunjukkan pola yang sama antara daerah perkotaan dan perdesaan yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan individu maka semakin tinggi tingkat pengangguran pada kelompok pendidikan tersebut, meskipun pada kelompok jenjang pendidikan tinggi yaitu diploma, akademik dan universitas trennya kembali menurun. Ada beberapa kemungkinan yang

dapat dijelaskan pada pola tersebut pertama, pendidikan SMA merupakan jenjang pendidikan tanggung, tidak rendah dan tidak tinggi sehingga tenaga kerja tidak mau mengambil pekerjaan kasar seperti sektor pertambangan dan pertanian yang mendominasi perekonomian di Papua, tetapi mereka juga belum bisa masuk tenaga kerja terampil. Kedua, data Sakernas menunjukkan bahwa sebesar 12,67 persen angka kerja yang menganggur berasal dari kelompok umur pemuda 20-24 tahun yang sangat dekat dengan usia SLTA 16-18 tahun dan usia pendidikan tinggi 19-24 tahun. Sehingga diduga mereka kesulitan memenuhi kualifikasi pengalaman yang sering menjadi salah satu persyaratan pekerjaan. Ketiga, para pengangguran pemuda tersebut masih mendapat dukungan finansial dari keluarganya sehingga secara sukarela menjadi pengangguran.⁹

d. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Papua memiliki wilayah sangat luas dengan kepadatan penduduk rendah dan dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 16.773 km.¹⁰

⁹*Ibid.*

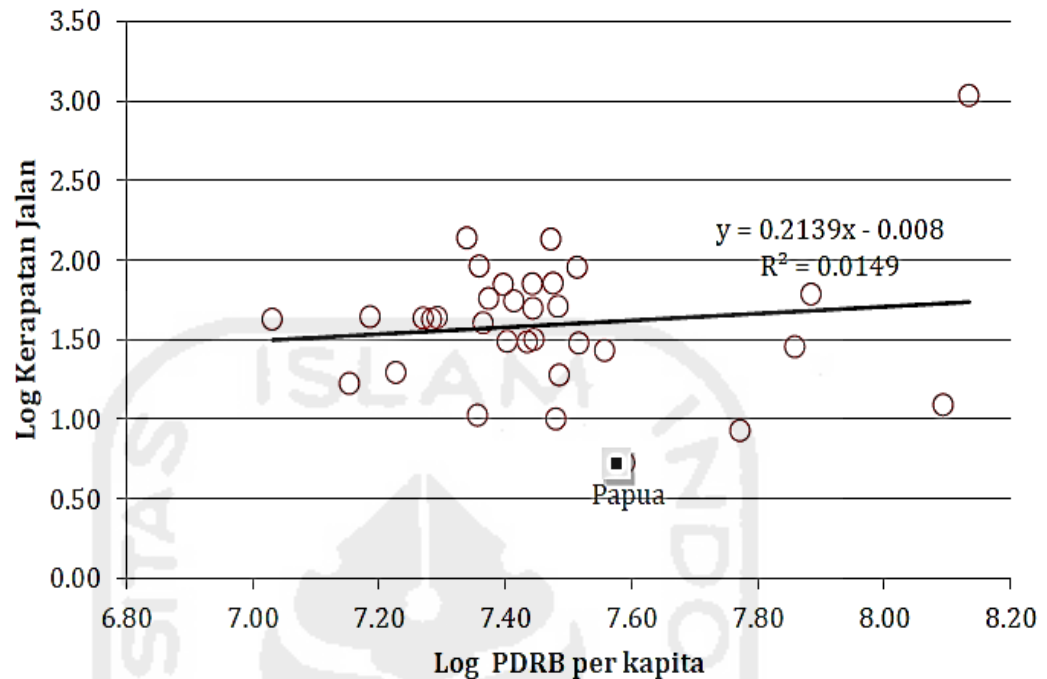
¹⁰ BPS Papua., *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Papua 2015*, (Papua : CV. Mitra Karya Pura.2016) hlm.37-39

Tabel 4.7. Kerapatan Jalan dan PDRB Perkapita Provinsi

No.	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	136.407,58	1068,36
2	D.I Yogyakarta	21.873,72	136,19
3	Bali	29.666,48	133,20
4	Jawa Tengah	22.858,32	90,56
5	Jawa Timur	32.703,80	89,03
6	Banten	29.961,85	70,84
7	Sulawesi Selatan	27.760,65	69,98
8	Jawa Barat	24.961,05	69,55
9	Kepulauan Riau	76.753,11	60,40
10	Lampung	23.648,76	56,85
11	Sumatera Barat	25.963,24	54,57
12	Sumatera Utara	30.482,59	50,41
13	Sulawesi Utara	27.804,68	49,14
14	Nusa Tenggara Barat	15.351,54	43,52
15	Bengkulu	19.631,40	43,06
16	Gorontalo	18.627,37	42,76
17	Nusa Tenggara Timur	10.742,42	42,10
18	Sulawesi Barat	19.211,14	41,93
19	Aceh	23.199,49	39,86
20	Sulawesi Tenggara	27.898,88	31,32
21	Sulawesi Tengah	25.316,32	30,38
22	Kalimantan Selatan	27.230,80	30,16
23	Kep Bangka Belitung	32.868,70	29,62
24	Riau	72.331,01	28,27
25	Jambi	36.088,33	26,65
26	Maluku Utara	16.872,31	19,39
27	Sumatera Selatan	30.627,55	18,71
28	Maluku	14.230,08	16,61
29	Kalimantan Timur	123.985,45	12,13
30	Kalimantan Barat	22.707,79	10,42
31	Kalimantan Tengah	30.220,97	9,93
32	Papua Barat	59.156,84	8,40
33	Papua	38.891,99	5,26

Sumber : BPS Papua dalam Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Papua 2015

Gambar 4.2. Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Perkapita



Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB perkapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 4.2).

Semakin tinggi pendapatan perkapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Papua relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Papua masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan.¹¹

¹¹*Ibid.*

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Papua belum cukup baik dan berada jauh dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan jenis permukaannya, persentase jalan belum beraspal di Provinsi Papua masih besar, yaitu sebesar 49,97 persen. Data kualitatif menunjukkan adanya tingkat kerusakan jalan di Papua lebih tinggi dari pada wilayah lain di Indonesia yang kemungkinan disebabkan oleh desain teknik yang tidak cocok untuk medan dan kondisi tanah yang sulit, hasil perkiraan biaya dan anggaran yang tidak memadai, mutu konstruksi dan pengawasan konstruksi yang buruk yang kemudian diperparah oleh pemeliharaan yang tidak memadai.

Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.¹²

B. Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2011-2015

1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process to enlarging the choice of people), indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu : umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan

¹²*Ibid.*

oleh Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan atau tingkat pendidikan yang diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Angka IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah menunjukkan semakin baik pencapaian pembangunan manusia wilayah tersebut.¹³

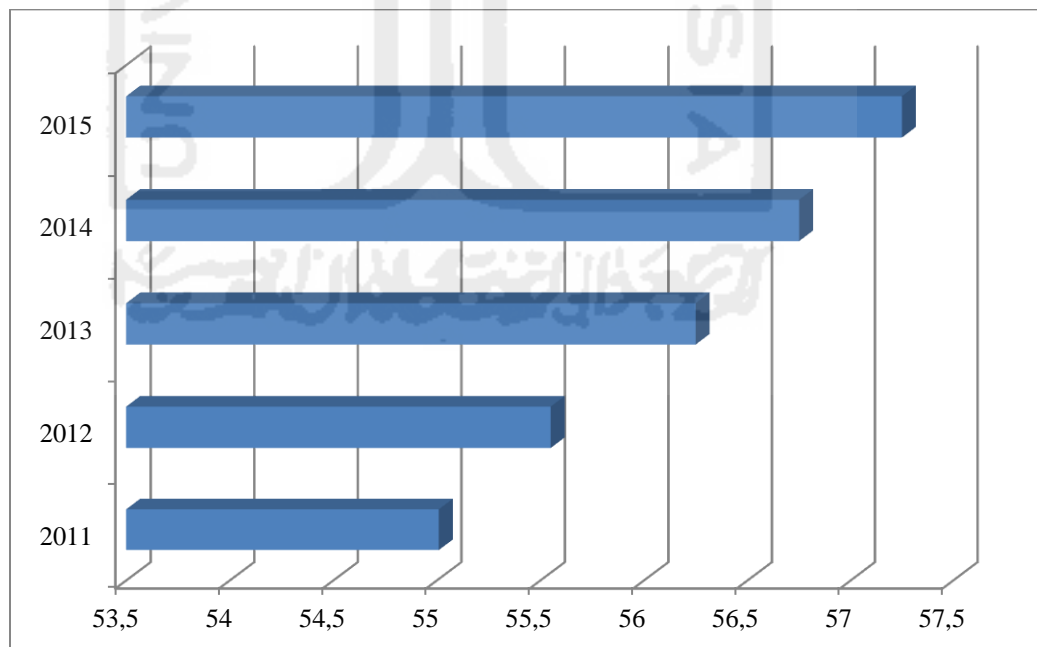
Jika ketiga indikator IPM diakutkan dengan pembangunan ekonomi, akan menunjukkan semakin tinggi pembangunan ekonomi suatu wilayah maka semakin tinggi pendapatan perkapita penduduknya, semakin besar angka harapan hidup atau semakin lama rata-rata umur seseorang dan semakin rendah angka kematian bayi di wilayah tersebut, lalu semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat atau semakin tinggi harapan lama sekolah dan semakin lama rata-rata sekolah, serta semakin baik pula pendapatan riil perkapita masyarakat atau bisa disebut juga semakin baik standar hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Pencapaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM > 80,0$), Tinggi ($70 < IPM < 80$), sedang ($60 < IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Pada tahun 2011-2015, IPM Provinsi Papua selalu

¹³ BPS Provinsi Papua, . *Laporan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tahun 2016*, (Papua : CV. Mitra Karya Pura.2016) hlm.53

berada pada kriteria rendah yaitu sebesar 54,45-57,25, namun nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan proses pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan serta peningkatan kerja pemerintah yang sejalan dengan peningkatan perekonomian di Papua. Namun jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, Papua selalu menempati peringkat terbawah selama periode 2011-2015, nilai IPM Papua masih berada di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan beberapa wilayah lainnya di kawasan Indonesia bagian timur. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi atau ranking, tetapi dapat juga dilihat berdasarkan ukuran IPM untuk pencapaian maksimalnya (indeks 100), berdasarkan ukuran tersebut terlihat besar akselerasi capaian pembangunan dalam satu tahun.¹⁴

Grafik 4.3. Perkembangan IPM Provinsi Papua 2011-2015 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua (diolah)

¹⁴*Ibid.* hlm. 54-55

Perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100) ditunjukkan dengan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM Papua 2014-2015 hanya tumbuh sebesar 0,88 persen sehingga secara nasional menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi. Pemerintah Papua diharapkan dapat lebih giat lagi melakukan program-program pembangunan salah satunya melalui Gerbang Mas yang direncanakan sebagai visi pembangunan saat ini hingga masyarakat Papua lebih berkembang seperti wilayah lain di Indonesia.

Tabel 4.8. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Papua, 2010-2015

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	66.03	66.28	66.88	67.33	67.75
Jayawijaya	51.66	52.27	52.94	53.37	54.18
Jayapura	68.04	68.85	69.21	69.55	70.04
Nabire	64.96	65.28	65.45	66.25	66.49
Kepulauan Yapen	63.82	64.11	64.34	64.89	65.28
Biak Numfor	68.80	69.05	69.35	70.32	70.85
Paniai	53.02	53.34	53.70	53.93	54.20
Puncak Jaya	40.36	41.85	43.36	44.32	44.87
Mimika	68.74	68.95	69.50	70.40	70.89
Boven Digoel	56.89	57.45	57.96	58.21	59.02
Mappi	54.61	55.09	55.51	55.74	56.11
Asmat	44.58	45.08	45.54	45.91	46.62
Yahukimo	41.72	43.82	45.63	46.36	46.63
Pegunungan Bintang	36.61	37.82	38.94	39.68	40.91
Tolikara	44.41	44.86	45.68	46.16	46.38
Sarmi	57.96	59.03	59.51	60.48	60.99

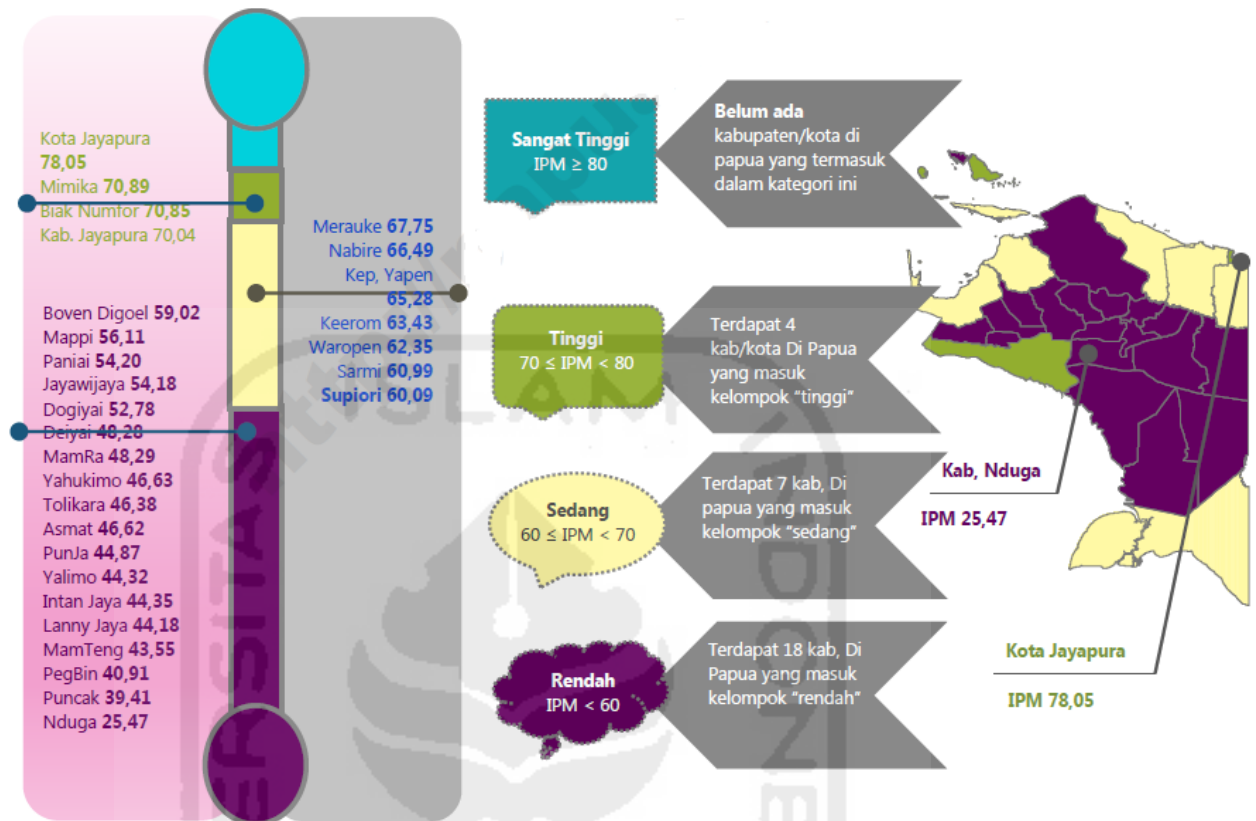
Keerom	60.65	61.13	62.49	62.73	63.43
Waropen	60.94	61.32	61.68	61.97	62.35
Supiori	58.31	58.86	59.40	59.70	60.09
Mamberamo Raya	45.82	46.62	47.28	47.88	48.29
Nduga	21.12	23.07	24.42	25.38	25.47
Lanny Jaya	41.90	42.53	43.05	43.28	44.18
Mamberamo Tengah	40.17	41.39	42.43	43.19	43.55
Yalimo	40.45	41.84	43.33	44.21	44.32
Puncak	35.08	36.85	37.73	38.05	39.41
Dogiyai	48.48	50.59	51.46	52.25	52.78
Intan Jaya	40.07	41.89	42.69	43.51	44.35
Deiyai	46.12	46.94	47.74	48.12	48.28
Kota Jayapura	76.97	77.25	77.46	77.86	78.05
Provinsi Papua	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25

Sumber : BPS Provinsi Papua

Tahun 2015, terdapat empat kabupaten di Papua yang memiliki IPM kategori tinggi, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten-kabupaten tersebut berada diwilayah daratan yang mudha dijangkau. Sementara terdapat tujuh kabupaten dengan IPM sedang dan 18 kabupaten kategori rendah.

Angka IPM menurut wilayah di Papua bersifat heterogen, perdedaan tersebut terjadi karena perbedaan prioritas pembangunan, prioritas sasaran program, serta perbedaan kebijakan yang diambil masing-masing wilayah. Tahun 2015 capaian IPM tertinggi ada di Kota Jayapura. Kota ini merupakan ibukota provinsi dan selalu menempati peringkat teratas pencapaian IPM Papua.

Garafik 4.4. Sebaran IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua 2015



Sumber : BPS Provinsi Papua. Laporan Ekonomi Daerah Provinsi Papua 2016

Nilai IPM tertinggi selanjutnya setelah Kota Jayapura dengan nilai 78,05 adalah Kabupaten Mimika dan Biak Numfor, dengan nilai IPM masing-masing mencapai 70,89 dan 70,85. Kemudian disusul Kabupaten Jayapura 70,04. Sedangkan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Nduga dengan nilai IPM terendah dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Semakin tinggi ketimpangan ekonomi menunjukkan semakin buruk kualitas pembangunan yang dihasilkan.¹⁵

¹⁵*Ibid.* hlm.57

2. Tingkat Gini Rasio Kabupaten/Kota

Salah satu ukuran paling penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah koefisien Gini. Koefisien ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi Uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain gini rasio. Gini rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai satu. Apabila nilai gini rasio mendekati nol, maka ketimpangan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila gini rasio mendekati angka 1, maka ketimpangan pendapatan makin tinggi.¹⁶ Gini rasio dibagi dalam tiga kategori :

- 1) GR lebih dari 0,4; keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan ketimpangan tinggi
- 2) GR 0,3-0,4; keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan ketimpangan sedang
- 3) GR kurang dari 0,3; keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan ketimpangan rendah.

Nilai gini rasio Papua pada tahun 2015 adalah 0,42 yang berarti ketimpangan menengah. Nilai gini rasio di Papua cukup bervariasi antara kabupaten dan kota. Ketimpangan pendapatan paling tinggi yang ditunjukkan oleh nilai gini rasio yang lebih tinggi ada di Kabupaten Marauke yaitu sebesar

¹⁶ BPS Papua, *Laporan Ekonomi*..hlm 45

0,41 kemudian Jayawijaya sebesar 0,396 dan Biak Numfor 0,391 . Sedangkan ketimpangan paling rendah adalah Yalimo yaitu 0,135. Untuk Kabupaten Nduga tidak tersedia.¹⁷

Angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, gini rasio Provinsi Papua mengalami peningkatan dari 0,410 menjadi 0,4221, ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk.

Tabel 4.9. Gini Rasio Provinsi Papua menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2015

Kabupaten	Gini Ratio				
	2011	2012	2013	2014	2015
Merauke	0,39	0,41	0,47	0,45	0,41
Jayawijaya	0,42	0,40	0,37	0,34	0,40
Jayapura	0,29	0,28	0,27	0,32	0,39
Nabire	0,34	0,37	0,33	0,35	0,39
Kepulauan Yapen	0,32	0,36	0,32	0,36	0,37
Biak Numfor	0,30	0,46	0,42	0,39	0,39
Paniai	0,30	0,25	0,32	0,25	0,32
Puncak Jaya	0,24	0,25	0,22	0,27	0,34
Mimika	0,33	0,34	0,30	0,34	0,33
Boven Digoel	0,40	0,35	0,30	0,35	0,36
Mappi	0,38	0,41	0,30	0,30	0,34
Asmat	0,44	0,42	0,39	0,39	0,34
Yahukimo	0,31	0,34	0,27	0,30	0,26

¹⁷*Ibid.*.hlm 46

Pegunungan Bintang	0,21	0,18	0,15	0,22	0,27
Tolikara	0,32	0,17	0,20	0,22	0,37
Sarmi	0,33	0,39	0,33	0,43	0,35
Keerom	0,36	0,33	0,28	0,31	0,36
Waropen	0,23	0,18	0,22	0,28	0,33
Supiori	0,23	0,29	0,28	0,24	0,28
Mamberamo Raya	0,30	0,36	0,31	0,27	0,23
Nduga	0,26	0,21	0,20	0,22	-
Lanny Jaya	0,20	0,21	0,18	0,22	0,30
Mamberamo Tengah	0,29	0,24	0,23	0,26	0,27
Yalimo	0,27	0,28	0,26	0,21	0,14
Puncak	0,16	0,22	0,18	0,25	0,33
Dogiyai	0,24	0,20	0,19	0,25	0,20
Intan Jaya	0,23	0,29	0,23	0,38	0,27
Deiyai	0,32	0,33	0,32	0,26	0,28
Kota Jayapura	0,27	0,37	0,38	0,35	0,35
Provinsi Papua	0,39	0,44	0,41	0,41	0,42

Sumber : BPS Provinsi Papua

Gini rasio pada tabel 4.9., menerangkan bila rata-rata kabupaten dan kota gini rasionya fluktuatif atau tidak stabil dalam penurunan ketimpangan antara si kaya dan miskin. Namun ada satu kabupaten yang konsisten menurunkan angka ketimpangan yakni Kabupaten Asmat. Dari 2011 0,44 persen, 2012 di angka 0,42 persen, kemudian 2013 0,39 persen, 2014 0,39 persen dan 2015 Asmat mampu menurunkan menjadi 0,34 atau turun dalam kurun 5 tahun 0,10 persen gini rasionya.

Sementara pada 2011 kabupaten yang paling buruk gini rasionya yaitu Asmat 0,44 persen dan Jayawijaya 0,42 persen. Tahun 2012 kabupaten Biak

Numfor 0,46 persen dan Asmat 0,42 persen, 2013 Kabupaten Marauke 0,47 persen dan Biak Numfor 0,42 persen. Kemudian 2014 Marauke kembali menjadi kabupaten yang buruk gini rasionya 0,45 persen dan Sarmi 0,43 persen. Tahun 2015 Marauke 0,42 persen dan Jayawijaya 0,40 persen.

Untuk kabupaten yang paling rendah gini rasionya itu Pegunungan Bintang dengan rata-rata gini rasionya 2011-2015 hanya 0,206 persen, kemudian Dogiyai 0,216 persen, Lanny Jaya 0,222 persen, Puncak 0,228 persen, Yalimo 0,232 persen, Waropen 0,248 persen, Tolikara 0,256 persen, Mamberamo Tengah 0,258 persen, Puncak Jaya dan Supiori 0,264 persen, Intan Jaya 0,28 persen, Paniai 0,288persen, Mamberamo Raya 0,294 persen dan Yahukimo 0,296 persen. Selain kabupaten yang telah dijabarkan tersebut angka gini rasionya diangka 0,302 persen sampai 0,396 persen. Hanya kabupaten Marauke yang rata-rata gini rasionya 2011-2015 diangka 0,426 persen.

3. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa mengurangi angka kemiskinan. Salah satu indikator kemakmuran adalah PDRB perkapita atas harga berlaku.¹⁸ Setiap tahunnya PDRB perkapita berbeda-deda antara daerah yang satu dengan daerah yang

¹⁸ PDRB perkapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah. BPS Papua, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*, (Papua : CV. Mitra Karya Pura.2016) hlm.4

lainnya. PDRB perkapita hasil dari PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Tabel 4.10. PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua 2011-2015 di Urutkan dari yang Kecil ke Besar (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1.	Lanny Jaya	4.43	5.34	5.93	6.37	7.15	5.84
2.	Puncak	5.06	5.71	6.53	7.56	8.84	6.74
3.	Nduga	5.19	6.19	7.05	7.590	8.58	6.92
4.	Tolikara	6.53	6.63	7.20	7.95	8.56	7.37
5.	Yahukimo	5.74	6.77	7.64	8.46	9.51	7.62
6.	Puncak Jaya	6.92	7.18	7.44	7.88	8.72	7.63
7.	Dogiyai	6.15	6.85	7.57	8.66	9.92	7.83
8.	Deiyai	7.34	8.12	9.47	11.14	13.27	9.86
9.	Yalimo	7.85	9.29	10.74	12.05	13.71	10.72
10.	Mamberamo Tengah	10.49	12.6	14.42	15.72	17.39	14.12
11.	Paniai	11.73	12.45	13.71	15.59	17.82	14.26
12.	Intan Jaya	10.00	12.44	14.38	16.69	19.84	14.67
13.	Asmat	12.41	13.94	15.36	17.13	18.91	15.55
14.	Pegunungan Bintang	13.73	14.65	15.55	17.02	18.40	15.87
15.	Mappi	14.24	15.51	16.74	18.77	20.82	17.21
16.	Jayawijaya	15.50	17.63	20.31	23.31	26.18	20.58
17.	Biak Numfor	20.75	23.02	25.48	28.75	33.10	26.22
18.	Kepulauan Yapen	22.73	24.56	26.90	29.68	32.91	27.35
19.	Supiori	31.73	35.24	37.13	39.86	41.85	29.98
20.	Keerom	25.08	28.17	31.44	35.46	39.44	31.91
21.	Merauke	29.51	32.86	37.16	41.72	46.96	37.64
22.	Mamberamo Raya	29.06	33.04	37.21	42.47	48.57	38.07
23.	Waropen	30.10	34.49	39.25	44.67	50.03	39.70

24.	Sarmi	33.65	36.57	39.90	44.74	49.59	40.89
25.	Nabire	34.23	38.00	42.92	48.98	55.73	43.97
26.	Boven Digoel	41.78	44.07	47.39	52.05	56.79	48.42
27.	Jayapura	45.57	52.09	59.27	70.77	81.52	61.84
28.	Kota Jayapura	49.56	56.42	64.48	75.94	83.89	66.05
29.	Mimika	283.47	260.04	266.06	251.30	271.98	266.57
Provinsi Papua		28.29	29.65	32.22	33.53	38.62	32.46

Sumber : BPS Nasional (diolah)

Dilihat dari tabel 4.10., terlihat jelas Kabupaten Lanny Jaya dengan rata-rata PDRB perkapita sangat kecil hanya 5.84 juta rupiah. Sangat jauh dari Kabupaten Mimika yang sangat kaya dengan rata-rata PBRB perkapita 2011-2015 yaitu 266,57 juta, selisih 260,73 juta rupiah. Kondisi menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Papua sangat mencolok.

Dari 29 kabupaten dan kota sebanyak 20 kabupaten yang rata-rata PDRB perkapita 2011-2015 di bawah rata-rata PDRB perkapita provinsi 32,46 juta. Kabupaten yang dimaksud yakni Lanny Jaya 5,84 juta, Puncak Jaya 6,74 juta, Nduga 6,92 juta, Tolikara 7,37 juta, Yahukimo 7,62 juta, Puncak Jaya 7,63 juta, Dogiyai 7,83 juta, Deiyai 9,86 juta, Yalimo 10,72 juta, Mamberamo Tengah 14,12 juta, Paniai 14,26 juta, Intan Jaya 14,67 juta, Asmat 15,55 juta, Pegunungan Bintang 15,87 juta, Mappi 17,21 juta, Jayawijaya 20,58 juta, Biak Numfor 26,22 juta, Kepulauan Yapen 27,35 juta, Supiori 29,98 juta dan Keerom 31,91 juta. Selain 20 kabupaten tersebut rata-rata PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita provinsi. Sembilan kabupaten yang di atas rata-rata PDRB perkapitanya dari 37,64 juta sampai 266,57 juta.

4. Tingkat Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten dan kota yang terjadi di Papua analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson.

Rumus indeks ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Bila Indeks Williamson kurang dari ($<$) 0,3 artinya ketimpangan ekonomi wilayah rendah kemudian 0,3-0,5 ketimpangan ekonomi wilayah sedang dan Indeks Williamson lebih dari ($>$) 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi.¹⁹

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Tingkat Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Papua dengan Menggunakan Rumus Indeks Williamson Tahun 2011-2015

Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Merauke	0,011	0,028	0,040	0,041	0,057	0,035
Jayawijaya	0,118	0,105	0,096	0,050	0,082	0,090
Jayapura	0,121	0,150	0,166	0,274	0,218	0,186
Paniai	0,125	0,123	0,122	0,069	0,114	0,111
Puncak Jaya	0,129	0,129	0,131	0,068	0,132	0,118
Nabire	0,044	0,059	0,070	0,090	0,093	0,071
Mimika	2,083	1,792	1,673	3,109	1,38	2,007
Kepulauan Yapen	0,037	0,033	0,032	0,025	0,028	0,031
Biak Numfor	0,068	0,057	0,053	0,029	0,036	0,049
Boven Digoel	0,067	0,069	0,066	0,113	0,067	0,076
Mappi	0,085	0,081	0,082	0,063	0,079	0,078
Asmat	0,094	0,089	0,088	0,066	0,086	0,085
Yahukimo	0,192	0,185	0,183	0,069	0,181	0,162
Pegunungan Bintang	0,078	0,076	0,078	0,066	0,079	0,075

¹⁹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, cetakan ke-4 (ogyakarta ;UPP STIM YKPN,2006) hlm.152

Tolikara	0,156	0,158	0,158	0,068	0,159	0,140
Sarmi	0,020	0,025	0,026	0,060	0,031	0,032
Keerom	0,015	0,007	0,003	0,004	0,003	0,006
Waropen	0,006	0,015	0,021	0,060	0,028	0,026
Supiori	0,009	0,014	0,011	0,029	0,006	0,014
Mamberamo Raya	0,002	0,009	0,012	0,045	0,021	0,018
Nduga	0,137	0,133	0,131	0,068	0,135	0,121
Lanny Jaya	0,194	0,189	0,188	0,065	0,191	0,165
Mamberamo Tengah	0,074	0,068	0,066	0,068	0,067	0,069
Yalimo	0,097	0,092	0,090	0,071	0,088	0,088
Puncak	0,149	0,147	0,145	0,068	0,14	0,130
Dogiyai	0,134	0,132	0,131	0,070	0,127	0,119
Deiyai	0,089	0,087	0,084	0,071	0,079	0,082
Intan Jaya	0,096	0,086	0,082	0,067	0,072	0,081
Kota Jayapura	0,226	0,271	0,300	0,325	0,352	0,295

Sumber: Diolah dari data BPS, Jumlah Penduduk Kab/Kota dan PDRB di Provinsi Papua berbagai edisi.

Dari tabel 4.11. diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata angka indeks Williamson tiap kabupaten dan kota selama periode 2011-2015 berkisar antara 2,007 sampai dengan 0,006. Dimana tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika dengan rata-rata angka Indeks Williamson sebesar 2,007 dan kedua ditempati oleh Kota Jayapura dengan angka sebesar 0,295. Kemudian disusul Kabuapten Jayapura 0,186. Sementara posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Keerom dengan rata-rata angka Indeks Williamson 2011-2015 sebesar 0,006. Sesuai dengan rumus Indeks Williamson akan menghasilakn perhitungan tingkat ketimpangan pendapatn jika angka indeks lebih besar dari pada 1 (satu) dapat dilihat lebih jelas bahwa diantara

kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua yang menunjukkan besarnya tingkat ketimpangan antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Mimika pada tahun 2011 sebesar 2,083. Selanjutnya 2012 di angka 1,792 tahun 2013, 2014 dan 2015 diangka 1,673, 3,109 dan 1,380. Kabupaten dan kota lainnya juga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah tapi tingkat ketimpangannya rendah yakni lebih kecil dari 0,3.

Pada tahun 2014 rata-rata kabupaten dan kota di Papua tingkat ketimpangannya mengalami kenaikan yang cukup besar dan berada di urutan tertinggi masih ditempati Kabupaten Mimika dengan angka Indeks Williamson sebesar 3,109 dan urutan terendah Kabupaten Keerom dalam angka Indeks Williamson 0,003. Untuk tahun 2011 tingkat ketimpangan yang berada di urutan tertinggi masih Kabupaten Mimika dengan angka Indeks Williamson sebesar 2,083. Dan Kabupaten Mamberamo mampu memperkecil Indeks Williamson dan angka tersebut pencapaian terbaik sepanjang 2011-2015 yaitu 0,002.

Bila dilihat setiap tahun selama periode penelitian, hanya ada satu kabupaten dengan rata-rata tingkat ketimpangan tertinggi selalu ditempati oleh Kabupaten Mimika. Sementara tingkat ketimpangan sedang Kota Jayapura di tahun 2013, 2014 dan 2015. Tahun sebelumnya ketimpangannya masuk kategori rendah. Selain Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura, semua kabupaten di Provinsi Papua Indeks Williamsonnya sangat rendah dengan angka rata-rata selama periode 2011-2015 dari 0,006 sampai 0,186.

Apabila rata-rata angka indeks Williamson ini dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita di masing-masing kabupaten dan kota maka akan nampak bahwa Kabupaten Mimika yang menempati angka PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Papua juga di urutan pertama tertinggi dalam rata-rata indeks ketimpangan Williamson. Selanjutnya Kota Jayapura dengan rata-rata PDRB perkapita tertinggi kedua dan berada pada posisi kedua dalam indeks ketimpangan Williamson. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura selalu diikuti dengan tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 4.12. Rata-rata Indeks Williamson dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2011-2015.

Kabupaten	Rata-Rata IW	Rata-Rata PDRB Perkapita	Keterangan Kategori
Mimika	2,007	266.570	Tinggi
Kota Jayapura	0,300	66.058	Sedang
Jayapura	0,186	61.844	Rendah
Lanny Jaya	0,165	5.844	Rendah
Yahukimo	0,162	7.624	Rendah
Tolikara	0,140	7.374	Rendah
Puncak	0,130	6.740	Rendah
Nduga	0,121	6.920	Rendah
Dogiyai	0,119	7.830	Rendah
Puncak Jaya	0,118	7.628	Rendah
Paniai	0,111	14.260	Rendah
Jayawijaya	0,090	20.586	Rendah
Yalimo	0,088	10.728	Rendah
Asmat	0,084	15.550	Rendah
Deiyai	0,082	9.868	Rendah

Intan Jaya	0,081	14.670	Rendah
Mappi	0,078	17.216	Rendah
Boven Digoel	0,076	48.416	Rendah
Pegunungan Bintang	0,076	15.870	Rendah
Nabire	0,071	43.972	Rendah
Mamberamo Tengah	0,069	14.124	Rendah
Biak Numfor	0,049	26.220	Rendah
Merauke	0,035	37.642	Rendah
Sarmi	0,033	40.890	Rendah
Kepulauan Yapen	0,031	27.356	Rendah
Waropen	0,026	39.708	Rendah
Mamberamo Raya	0,018	38.070	Rendah
Supiori	0,014	37.162	Rendah
Keerom	0,006	31.918	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua (diolah)

Kesenjangan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Pendapatan perkapita di Provinsi Papua relatif lebih tinggi daripada pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Wilayah Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah daripada wilayah lain di Indonesia dengan konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman. PDRB perkapita di Kabupaten Mimika tergolong tinggi karena potensi sumber daya alam di bidang pertambangan dan didukung oleh keberadaan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yang sudah puluhan tahun melakukan penambangan

terhadap bijih tembaga, emas, dan perak. Infrastruktur di Mimika terbangun dengan keberadaan kota modern, bandara, pelabuhan, serta fasilitas jalan.

Lapangan kerja di Kabupaten Mimika cukup terbuka meskipun tidak menyerap seluruh penduduk lokal. Perusahaan pendukung kegiatan pertambangan juga bermunculan di Mimika sehingga aktivitas ekonomi di wilayah ini semakin berkembang dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Seluruh lapangan pekerjaan yang digerakkan penduduk lokal maupun pendatang menghasilkan perputaran uang yang cukup besar. Hal ini bukan hanya menjadikan pendapatan perkapita Kabupaten Mimika tinggi, namun juga memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

C. Pandangan ekonomi Islam mengenai kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Papua

Kondisi ekonomi penduduk Provinsi Papua tersebut merupakan bagian penting, yang perlu diperhatikan sebagai satu ironi bagi bangsa yang telah lama merdeka. Terutama bagi pemerintah pusat yang memiliki harapan akan tercapainya masyarakat yang sejahtera, seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan masyarakat.

Peran ekonomi Islam pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting terutama ketika melihat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim (87,21%). Hal ini memiliki potensi besar untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya dengan jumlah yang mayoritas pula, umat Islam akan menjadi beban bagi ekonomi Indonesia jika tidak dikelola dengan baik, terutama disebabkan oleh banyak penduduk

miskin yang notabennya adalah muslim. Oleh sebab itu, sangat wajar jika ekonomi Islam mengambil peran dan bagian aktif dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, meskipun hanya dengan memberi tawaran konsep-konsep yang dilahirkan.

Ekonomi Islam dapat menciptakan keadilan ekonomi dan diharapkan dari instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Namun di Provinsi Papua, pemeluk agama Islam bukanlah mayoritas, karena jumlah penduduk muslim hanya 456.510 jiwa atau jika di persentasekan 13,15 persen dari total penduduk 3.471.434 jiwa.²⁰

Tabel 4.13. Data Umat, Tempat Ibadah, Penyuluhan PNS Provinsi Papua

Agama	Kristen	Katholik	Islam	Hindu	Budha
Jumlah Umat	2.159.086	846.665	456.510	5.357	3.816
Tempat Ibadah	4.121	1.170	711	25	10
Penyuluh PNS	45	17	18	1	

Sumber : Kementerian Agama Kanwi Papua, 2015

Meskipun demikian sistem ekonomi Islam tidak hanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh umat Islam sendiri. Namun lebih luas dari itu, sistem ekonomi Islam juga dapat diterapkan oleh semua umat agama, bahkan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dunia jika diterapkan dengan benar.²¹

²⁰ Kemenag RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013", <http://data.kemenag.go.id/>. Diakses pada Jumat, 02 Februari 2017, pukul 23.48 WIB.

²¹ Din Syamsudin, "Ekonomi Islam Berguna Untuk Kemaslahatan Umat Dunia", Keynote speech pada International Conference On Islamic Economics And Financial Inclusion (ICIEFI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 24 April 2016. Lihat : <http://www.umy.ac.id/ekonomi-islam-berguna-untuk-kemaslahatan-umat-dunia.html>

Dalam tesis ini peneliti mencoba memberikan pandangan ekonomi Islam mengenai kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua dengan menggunakan pendekatan pemikiran tokoh ekonomi Islam M. Umer Chapra, mengenai kesenjangan ekonomi. Dalam bukunya *Islam dan tantangan ekonomi (Islam and Economic Challenge)* ia menjabarkan solusi untuk memperkecil jarak antara si kaya dan si miskin atau kesenjangan antar masyarakat dan wilayah dalam satu negara. Alasan mengapa penulis menggunakan pemikiran Chapra dikarenakan beberapa poin yang ditawarkan dapat diaplikasikan di suatu daerah meski muslim menjadi minoritas bukan mayoritas.

Kontribusi yang diberikan Islam membantu untuk menyediakan mekanisme filter dan sistem motivasi yang akan membantu redistribusi beban penyesuaian dari si miskin kepada yang kaya, dan ini amat berbeda dengan program penyesuaian sekuler yang dikandung dalam kerangka sosialis maupun neoklasik.²²

Lima dimensi kebijakan yang disarankan untuk memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah integrasi dimensi moral dan material kehidupan yang direfleksikan dalam paket kebijakan.

²² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.247

1. Pembangunan Manusia

a. Motivasi

Selama individu tidak dimotivasi secara benar, tak akan ada sistem yang dapat merealisasikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya maupun pemerataan distribusi. Untuk memberikan motivasi kepada individu agar bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi, kepentingan diri mereka perlu dipenuhi pada saat melakukan hal itu.²³

Memotivasi masyarakat agar terus aktif meningkatkan perekonomian dan taraf hidup ini, harus terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Papua. Mengingat tingkat pengangguran di Papua menurut usia pendidikan tahun 2015, kategori tidak atau belum pernah sekolah mencapai 4,27 persen untuk perkotaan dan pedesaan 0,46 persen. Ini artinya masih banyak para pekerja yang harus diberi motivasi dan dorongan pemerintah Papua agar semangat untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

b. Keadilan Sosial

Presiden Joko Widodo menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) berupa premium dan solar di Papua dan Papua Barat. Kebijakan itu merupakan upaya pemerintah menyeragamkan semua harga BBM di seluruh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab keadilan sosial. Secara

²³*Ibid.*, hlm. 251-252

keseluruhan kebijakan satu harga BBM itu baru bisa diwujudkan tahun 2017.

Melalui kebijakan itu, maka warga Papua kini bisa menikmati premium dan solar dengan harga yang hampir sama dengan harga BBM di Pula Jawa maupun wilayah lain di Indonesia. Harus diakui, bertahun-tahun warga Papua harus membeli premium dan solar dengan harga yang sangat tinggi. Harga BBM di Papua selama ini berkutat antara Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liter. Harga itu hampir sepuluh kali lipat lebih mahal dibanding harga BBM di daerah lain. Kondisi itu membuat biaya hidup di Papua menjadi sangat mahal. Daerah Papua juga menjadi daerah paling tertinggal di banding semua wilayah di Indonesia.²⁴

Sekarang warga Papua sudah menikmati harga BBM Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar. Penurunan harga BBM tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian di seluruh wilayah Papua. Harga-harga barang di Papua dipastikan akan turun secara bertahap sebagai efek penurunan drastis harga BBM. Meskipun demikian keadilan sosial ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat, agar di Papua keadilan sosial dapat terwujud dengan baik.

c. Perbaiki Kondisi Pedesaan

Infrastruktur fisik dipedesaan sangat membantu untuk menopang perekonomian disuatu daerah. Bila fasilitas di pedesaan buruk hal ini

²⁴ Danang J Murdono, "Mewujudkan Keadilan Sosial dari Papua" dikutip dari <http://www.netralitas.com/editorial/read/11752/mewujudkan-keadilan-sosial-dari-papua>, pada hari Kamis, 16 Februari 2017. Pukul 22.10 WIB.

menimbulkan banjir buruh ke pusat-pusat kota yang mengakibatkan penekanan pada upah dan penurunan kondisi ekonomi.²⁵

Saat ini pembangunan infrastruktur di Papua sedang gencar dilaksanakan, khususnya daerah-daerah yang sulit terjangkau. Mulai dari pembangunan bandara udara, jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah pusat sudah menyediakan dana sekitar Rp 7 triliun untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Papua.²⁶ Tentunya ini akan menggenjot perekonomian di wilayah tersebut, dan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat Papua.

d. Reformasi Perburuhan

Nilai-nilai Islam menghendaki para majikan memperlakukan buruhnya seperti anggota keluarganya sendiri. Hal ini menuntut agar para karyawan diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang serta kesejahteraan mereka harus dijamin. Idealnya tingkat upah riil dalam masyarakat, paling tidak memungkinkan para karyawan dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya dan para anggota keluarganya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, sebesar Rp2.663.646 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan rekomendasi Dewan Pengupahan setempat. UMP 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,39 persen, dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp2.435.000.

²⁵ *Ibid.*, hlm.253

²⁶ Danang J Murdono, "Mewujudkan Keadilan Sosial dari Papua" dikutip dari <http://www.netralitas.com/editorial/read/11752/mewujudkan-keadilan-sosial-dari-papua>, pada hari Kamis, 16 Februari 2017. Pukul 22.10 WIB.

UMP di Provinsi Papua cukup tinggi, namun penetapan UMP melalui survei kelayakan hidup.²⁷ Ini menunjukkan pemerintah terus mendorong agar kualitas pengupahan di Papua lebih baik lagi.

Setelah mendapatkan upah yang baik, maka pekerja juga harus diberi pelatihan, jaminan keamanan pekerja dan kalau bisa saham semua keuntungan dalam kerangka kerja jangka panjang serta hubungan yang harmonis.²⁸

e. Keadilan Bagi Para Produsen, Eksportir dan Konsumen

Begitu pula kurs tidak realistis dan kontrol-kontrol harga yang tidak perlu akan merugikan para produsen dan eksportir, sementara tarif protektif merugikan para konsumen. Tindakan-tindakan ini akan memenuhi kepentingan rakyat banyak dan mendorong pembangunan wilayah, biasanya hanya sebuah tipuan.²⁹ Karena memang tidak demikian. Justru semua tindakan itu hanya akan memenuhi kepentingan segelintir orang kaya dan berkuasa saja sehingga mereka semakin kaya dan berkuasa. Sementara, kepentingan rakyat banyak diabaikan dan kondisi mereka makin memburuk. Mereka juga menghalangi pihak otoritas untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sehat dalam rangka mengendalikan inflasi, memperluas suplai barang-barang dan jasa yang memenuhi hajat masyarakat dan memperluas peluang pekerja serta pendapatan masyarakat Papua.

²⁷ Hendrina Dian Kandipi, "Pemprov Papua tetapkan UMP 2017 sebesar Rp2,6 juta", diakses dari <http://papua.antaranews.com/berita/457798/pemprov-papua-tetapkan-ump-2017-sebesar-rp26-juta>. pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

²⁸ M. Umer Chapra, *IEC*,. hlm.256-257

²⁹ *Ibid.*,

Sementara itu, inflasi di Provinsi Papua pada triwulan III 2016 sebesar 4,72 persen, mengalami penurunan dari triwulan lalu yang sebesar 5,23 persen. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh komponen kelompok bahan makanan (*volatile food*) dan komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) yang semakin terkendali. Sementara inflasi pada komponen inti (*core inflation*) mengalami peningkatan. Ke depan, inflasi di Papua diperkirakan terjaga sesuai target nasional yaitu sebesar 4-1 persen.³⁰ Ini jelas bahwa pemerintahan Papua telah memperbaiki keadilan bagi produsen, eksportir dan konsumen. Ini senada dengan pemikiran Chapra yang mengarahkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran, sehingga inflasi bisa terkontrol dengan baik.

f. Dimensi Moral

Meskipun hubungan timbal balik (*quid pro quo*) antara kerja dan imbalan merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan kerja keras yang efisien, akan tetapi hal itu tidak dengan dirinya sendiri cukup untuk mendorong integritas dan kejujuran. Juga tidak memadai untuk memotivasi orang agar mengubah perilaku konsumtif, tabungan dan investasinya seirama dengan *maqasid*.³¹ Untuk mendorong dimensi moral ini pemerintahan Papua atau pemangku kepentingan, juga perlu

³⁰ BI, "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua November 2016", diakses dari [http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/papua/Pages/KEKR-Provinsi-Papua November 2016.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/papua/Pages/KEKR-Provinsi-Papua%20November-2016.aspx), pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

³¹ M. Umer Chapra, *IEC*. hlm.257

melakukan bimbingan keagamaan. Sehingga moral yang dibangun atas agama akan lebih melekat pada masyarakat.

Bila dilihat penyuluh agama PNS di yang tersebar di 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua sangat minim. Sesuai data Kementerian Agama 2015 bahwa penyuluh agama Islam hanya 18 orang dengan jumlah penduduk muslim 456.510 jiwa, kemudian agama Kristen dengan 4.121 orang penyuluh sedangkan jumlah pemeluknya 2.159.086 jiwa. Begitu pun agama Khatolik dengan jumlah pemeluk 846.665 jiwa penyuluh PNS 1.170 orang. Lebih memprihatinkan lagi Hindu hanya 1 penyuluh dengan pemeluk agama 5.357 jiwa. Bahkan agama Budha tidak mempunyai penyuluh meskipun jumlah pemeluknya 3.816 jiwa.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus bagi pemangku kekuasaan. Karena pembentukan moral ini sangat penting, bahkan konflik yang berkepanjangan di Provinsi Papua menurut hemat peneliti terjadi karena kurangnya pembentukan moral yang bersandar pada agama.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Kontribusi tak ternilai yang dapat disumbangkan oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi perbaikan kualitas SDM, keadilan sosioekonomi yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, kini diakui secara universal. Pendidikan membutuhkan pintu persamaan sosial dan peluang ekonomi dan telah dipandang sebagai “roda keseimbangan mesin sosial”.³² Sedangkan Papua selalu menempati peringkat terbawah

³²*Ibid.*, hlm.259

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2011-2015, nilai IPM Papua masih berada di bawah Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan beberapa wilayah lainnya di kawasan Indonesia bagian timur. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi atau ranking, tetapi dapat juga dilihat berdasarkan ukuran IPM untuk pencapaian maksimalnya (indeks 100), berdasarkan ukuran tersebut terlihat besar akselerasi capaian pembangunan dalam satu tahun.³³ Melihat hal tersebut patutnya pelatihan dan pendidikan bagi pekerja ini harus terus digalakan untuk mendorong IPM yang semakin baik lagi.

h. Akses pada Keuangan

Kurangnya akses bagi orang-orang miskin kepada keuangan memang merupakan faktor yang paling krusial, yang menggagalkan usaha memperluas kepemilikan bisnis dan industri, sehingga menghambat tujuan merealisasikan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi. Jika tindakan-tindakan efektif tidak diambil untuk menghapuskan kelemahan ini, maka sebuah sistem pendidikan yang merata dan lebih baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan pendapatan, tetapi secara substansial tidak efektif dalam mengurangi ketidakmerataan kekayaan.

Dari sisi Perbankan dan penanaman modal di Papua, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dibandingkan tahun

³³ BPS Provinsi Papua, Laporan Ekonomi, *op. cit.*

sebelumnya. PMDN tahun 2015 mencapai 46.650,71 Miliar Rupiah dan PMA mencapai US\$47.393,68 Juta. Peningkatan juga terjadi pada jumlah dana yang disimpan di bank oleh masyarakat Papua tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 14,27 persen dari tahun 2014. Dana tersebut didominasi oleh simpanan berupa tabungan yang mencapai lebih dari separuh dari total dana simpanan Papua.³⁴ Ini menunjukkan bahwa distribusi permodalan bagi pengusaha kecil belum maksimal dilakukan. Meskipun demikian perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Kota Jayapura, Papua hanya memiliki dua bank yang berbasis syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Muamalat, dengan total cabang 10 unit pelayanan. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir, belum ada penambahan. Ini yang harus digenjot lagi agar sistem bagi hasil dapat masyarakat Papua.

2. Mengurangi Pemusatan Kekayaan

a. Land Reforms

Keberadaan para tuan tanah dan lintah darat dinegara-negara berkembang, memiliki akses besar terhadap keuangan dan kekuasaan adalah benar-benar telah mengeksploitas para petani kecil, membunuh insentif mereka, memperlambat pertumbuhan output dan melenggangkan kemiskinan dan ketidak merataan ekonomi.³⁵

Dalam program *Land reform* ini menurut Chapra perlu dilakukan pembatasan maksimum pemilikan tanah dan masalah masa sewa tanah.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Umer Chapra, *IEC*,. hlm.263

Pembatasan pemilikan tanah ini dilakukan ketika kondisi memang dalam keadaan tidak adil, yang mengyengsarakan rakyat miskin, Ketika dalam keadaan moral, syariah tidak menggambarkan peletakan batas semacam itu untuk kekayaan pribadi. Sejumlah ilmuan termuka , termasuk imam Hasan al-Banna dan Maulana Abu A'la Maududi mendukung pembatasan semacam ini untuk mengembalikan suatu neraca yang adil dalam pemilikan dan untuk melindungi kepentingan sosial. Dinegara-negara Asia Timur yang menerapkan ini, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan hasil yang sangat positif terhadap *output* pertanian dan tenaga kerja. Distribusi pendapatan pun realitif lebih adil dibandingkan negara-negara yang memperbolehkan berlangsungnya pemusatan pemilikan tanah, mengalami tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dan distribusi yang lebih tidak adil.³⁶

Di Indonesia *land reform* diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960 maupun UU No 56 PRP/1960. Perkembangan lebih lanjut dari *Landreform* di Indonesia dalam pelaksanaannya mengalami stagnasi, tersendat-sendat dan tidak tuntas, sehingga terkesan dianaktirikan dalam kebijakan pembangunan. Ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah semakin nampak jelas akibat dari tidak maratnya pendistribusian/pembagian tanah. Hal ini dapat dilihat dari gejala tanah-tanah tersebut terakumulasi di tangan orang atau badan hukum tertentu.

³⁶ *Ibid.*

Mengenai hasil pelaksanaan Landreform di Indonesia, tidak ada data yang akurat mengenai pendaftaran tanah (*Land Cadastre*), pemilikan tanah secara minimal dan maksimal, jumlah orang yang tidak mempunyai tanah, buruh tani, dan lain sebagainya. Selain itu juga tidak ada data yang tersedia untuk mengetahui sejauh mana program redistribusi tanah mempengaruhi baik kesejahteraan sosial maupun peningkatan produksi pertanian. Tentunya hal tersebut berlaku juga di Provinsi Papua. Sehingga kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, harus ditegakan lagi.

b. Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro

Pengembangan perusahaan kecil dan mikro ini akan melengkapi *land reforms* dalam mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan di samping mempunyai keuntungan yang tinggi dalam kerangka nilai-nilai Islam, sehingga akan lebih kondusif untuk mewujudkan *maqasid*. Dampak positifnya adalah terhadap kesehatan sosial, sebab pemilikan perusahaan cenderung menambah rasa kemerdekaan, martabat dan harga diri pemiliknya. Ini akan mendorong mereka untuk melakukan inovasi dan kerja keras demi kesuksesan perusahaan mereka, sehingga akan menciptakan lingkungan lebih sehat untuk persaingan. Dengan demikian sangat berpotensi memperluas peluang kerja secara cepat.³⁷

Di Provinsi Papua UMKM terbanyak terdapat di Kota Jayapura dengan jumlah usaha sebanyak 768 unit, sementara jumlah usaha terkecil

³⁷*Ibid.*, hlm.269

terdapat di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 21 unit usaha bahkan terdapat beberapa kabupaten pemekaran yang belum memiliki UMKM. Berdasarkan perbandingan jumlah usaha di kedua wilayah tersebut menggambarkan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM juga belum secara merata berkembang di seluruh pelosok Provinsi Papua. Untuk itu maka diperlukan adanya kebijakan melalui pembinaan dan pelatihan yang kontinyu serta dukungan pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha masyarakat. Diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua melalui UMKM masih bersifat masalah klasik seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kurangnya pembinaan, masalah pemasaran, rendahnya kualitas SDM dan sebagainya.³⁸

3. Restruktur Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah persoalan manusia, maka penanganannya pun harus berangkat dari manusia. Islam memandang manusia tidak hanya dari sisi materi semata, tetapi nonmateri, hal ini lepas dari perhatian kapitalis.³⁹

³⁸ Muhamad Ismail, “Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua”, Jurnal Bina Praja, Volume. 7, No. 3 Edisi September 2015. hlm 251 - 260

³⁹ Taqyudidin An-Nabhani, *Membangun sistem ekonomi Alternatif : perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid, Surabaya :Risalah Gusti, h. 18. Lihat premis Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, “Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti, ketika mengharapkan mendapat makanan...”, Bonnie Setiawan, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 19.

dan sosialis.⁴⁰ Krisis pembangunan bukanlah semata-mata berpuncak pada krisis ekonomi akan tetapi krisis kemanusiaan seluruhnya (krisis peradaban). Oleh karena itu, analisis ekonomi tidak boleh terpisah dari kesempurnaan moral, yang tentunya melibatkan nilai yang tergabung di dalamnya keperluan *ideologi empirical* dan *pragmatic* . Dengan kata lain, nilai dan idealisme harus diterjemahkan secara praktis dan realistis. Dari sinilah Islam menawarkan perubahan yang menyeluruh (*holistic*) ditawarkan Chapra adalah mengarah ke sana yang meliputi :

a. Mengubah Preferensi Konsumen dengan Filter Moral

Untuk meminimalkan penggunaan sumber-sumber daya bagi pemuasan keinginan, perlu diubah preferensinya sesuai dengan prioritas sosial dan juga memotivasi mereka agar bertindak sesuai dengan prioritas. Akan tetapi, bagaimana melakukan hal ini tanpa paksaan dan despotisme. Disini pentingnya suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat dan suatu sistem untuk memotivasi konsumen agar menaati nilai-nilai.

Pembagian semacam ini dapat ditemukan dasarnya dalam nilai-nilai Islam. Ada pembicaraan intrinsik dalam literatur fiqih berkisar pada kebutuhan (*daruriyyat*), kesenangan (*ihajiyyat*), dan kelangkaan (*tahsiniyyat*). Apapun yang dilakukan diluar kebutuhan telah dianggap oleh para ulama fiqih sebagai pemborosan dan

⁴⁰ M. Umwr Chapra, *Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. M. Sonhadji dan Murwanto (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa. 1997)hlm. xxv

kesenangan diri yang berlebihan dan tidak dikehendaki.⁴¹ Dengan mengubah persepsi konsumsi ini, masyarakat Papua akan belih teliti dan jeli dalam membeli kebutuhan. Hal ini juga senada dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu mensosialisasikan gunakan uang dengan bijak. Meskipun UMP Papua menurut masyarakat masih minin, namun bila digunakan dengan filter moral konsumsi atau memprioritaskan kebutuhan pokok, maka bisa memperbaiki taraf ekonomi.

b. Reformasi Keuangan Publik : Mendisiplinkan Pemborosan

1) Prioritas dalam pengeluaran

Provinsi Papua tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 56,85 Triliun yang terdiri dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian atau Lembaga atau Satker sebesar Rp 13,68 triliun dan DIPA Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 43,17 triliun. Dana anggaran sebesar Rp 56,85 triliun itu bukan seluruhnya dikelola pemerintah provinsi Papua, tetapi bagian dari Kementerian atau Lembaga dan Satker sebesar Rp 13,68 triliun dan sisanya sebesar Rp 43,17 triliun itu juga bagian dari APBD kabupaten/kota dan Dana desa sehingga jumlahnya mencapai Rp 43,17 triliun. Alokasi belanja Kementerian atau Lembaga atau Satker difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur

⁴¹ M. Umer Chapra, *IEC*,. hlm. 284

dan konektifitas, peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial, serta memperkuat pertahanan dan keamanan mendukung stabilitas.⁴²

Tidak imbang pembanguana infrastrukturnya di desa ini menyebabkan langgengnya pertumbuhan yang lambat dan berlangsung ketidakadilan ekonomi, dan ini mencerminkan tidak adanya keadilan dalam pengeluaran.⁴³ Sehingga tepat rasanya bila pemerintah melakukan trobosan untuk pembangunan desa dengan pengucuran dana tersebut. Namun, perlu diingat bahwa infrastruktur memang penting dalam pembangunan ekonomi, tapi pembangunan manusia juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pengeluaran.

2) Pajak yang Adil dan Efisien

Meskipun banyak perdebatan dikalangan ulama fiqih tentang pajak, Chapra lebih condong kepada yang memberikan hak negara untuk menarik pajak dengan adil. Ia menyatakan bahwa tidak realitas membicarakan pajak harus dibatasi dengan pajak yang dibicarakan oleh ulama fiqih. Keadaan telah berubah dan timbul kebutuhan untuk memikirkan sistem perpajakan yang memperhitungkan perubahan realitas, terutama kebutuhan infrastruktur sosial dan fisik yang sangat besar bagi

⁴² Wilpret Siagian,. "2017, Provinsi Papua Dapat Anggaran Rp 56,85 T" dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3372393/2017-provinsi-papua-dapat-anggaran-rp-5685-t> , pada hari Kamis, 16 Februari 2017. Pukul 22.10 WIB.

⁴³ M. Umer Chapra, *IEC*,.hlm.286

pengembangan dan efisiensi ekonomi modern dan memiliki komitmen untuk merealisasikan *maqasid* dalam konteks kekinian.

Menurutnya pajak tidak hanya harus adil tetapi menghasilkan, tanpa memberikan efek merugikan insentif untuk kerja, menabung dan menginvestasi, pemasukan yang mencukupi untuk memungkinkan negara Islam modern untuk melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Hak negara ini didasari pada kaidah dari hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “*suatu pengorbanan kecil boleh dikenakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar,*” dan “*sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dilaksanakan adalah juga wajib*”.⁴⁴

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Maluku-Papua tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak 2016. Hingga akhir Desember 2016 penerimaan pajak hanya Rp10,32 triliun, meleset dari target yang ditetapkan Rp14 triliun. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Maluku-Papua tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak 2016. Hingga akhir Desember 2016 penerimaan pajak hanya Rp10,32 triliun, meleset dari target yang ditetapkan Rp14 triliun. Kepala Kanwil DJP Papua Maluku, Eka Sila Kusnajaya menjelaskan bila tak tercapainya target pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak yang masih menjadi dilema dan tulang

⁴⁴*Ibid.*, hlm, 295

panggung penerimaan DJP Maluku Papua 40-60 persen berasal dari anggaran pemerintah, terutama dari APBN dan APBD.⁴⁵ Dengan melihat kondisi demikian, perlu adanya pengawasan yang lebih serius lagi terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajaknya, khususnya pengusaha. Kasus pelarian dari kewajiban pajak ini masih banyak terjadi di Provinsi Papua seperti dalam pemberitaan detik.com yang menjelaskan ada tiga wajib pajak (WP) di Jawa Timur yang masih menunggak pajak, yang kini dalam pengejaran. Tunggakan sekitar Rp 1 triliun.⁴⁶

3) Membatasi defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua 2017 diperkirakan mengalami defisit Rp 1.115 triliun. Defisit ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp1,190 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016 Rp 650 miliar dan pencairan dana cadangan Rp540 miliar. Dana akan diprioritaskan membiayai sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan akan dibangun Rumah Sakit Umum Abepura, Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura, serta Rumah Sakit Jiwa. Sementara pada sektor pendidikan, dananya akan dipergunakan membiayai pembangunan sekolah unggulan di lima wilayah adat. Sementara

⁴⁵ Sindung Sukoco, "DJP Papua tak capai target penerimaan pajak", diakses dari <http://tabloidjubi.com/m/artikel-3152-djp-papua-tak-capai-target-penerimaan-pajak-.html>, pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

⁴⁶ Zainal Effendi, "DJP Papua dan Maluku Awasi Tiga Pengusaha Penunggak Pajak di Jatim", diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3207822/pjp-papua-dan-maluku-awasi-tiga-pengusaha-penunggak-pajak-di-jatim>, pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

itu, Pemprov Papua mengusulkan pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 meningkat 6,97 persen dibandingkan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 13,96 triliun menjadi Rp 13,9 triliun. Untuk belanja daerah tahun anggaran 2017, ditargetkan meningkat 10,95 persen dibanding tahun anggaran 2016 sebesar Rp 13,6 triliun menjadi Rp 15,09 triliun. Dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, Pemprov Papua menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi.⁴⁷

Untuk itu, perlu upaya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selanjutnya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran. Ini semakin menekan sumber-sumber pembangunan, melambatkan pertumbuhan dan meningkatkan pengangguran dan ketegangan sosial.

Namun, dalam implementasinya proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, yang paling utama bahwa APBD Provinsi Papua harus bermanfaat bagi pembangunan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

⁴⁷ Tiara,. "APBD Papua Diprediksi Defisit Rp 1.115 Triliun," diakses dari <https://www.pasificpos.com/headline/14259-apbd-papua-diprediksi-defisit-rp-1-115-triliun>, pada hari Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

4) Meningkatkan iklim investasi : menghilangkan rintangan

Modal adalah salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan suatu negara yang ingin mencapai peningkatan pendapatan tertentu secara agregat perlu menjamin peningkatan tertentu dalam input agregat modal.

Realisasi investasi di Papua terus meningkat. Hingga kuartal II tahun 2015, realisasi investasi Papua untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 33 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 43,36 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,26 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pemprov Papua menargetkan peningkatan realisasi hingga 30 persen. Pada tahun 2014, realisasi investasi Papua mencapai US\$ 41,13 miliar untuk PMA dan PMDN sebesar Rp 33,32 triliun. Penyerapan tenaga kerja TKI sebanyak 45.273 orang dan TKA sebanyak 1.064 orang yang tersebar di 186 proyek perusahaan PMA atau PMDN.⁴⁸

Pemprov Papua sangat konsisten dalam mendorong investasi dan memperbaiki iklim investasi di daerah tersebut. Karena bila iklim investasi dengan mengurangi hambatan investasi tentunya memperbaiki kondisi ekonomi di masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian kondisi makro ekonomi Papua juga sangat mendukung Provinsi Papua menjadi pusat pertumbuhan industri dan investasi.

⁴⁸ Dewi Rachmat Kusuma,. "Realisasi Investasi Papua Tembus Rp 76,36 T, Naik 7,26%", diakses dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3088243/realisasi-investasi-papua-tembus-rp-7636-t-naik-726>, pada hari Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

Angka pengangguran di Papua pada Februari 2015 mencapai 3,72 persen dari total angkatan kerja. Angka ini masih berada di bawah angka pengangguran nasional sebesar 5,81 persen.

Salah satu cara penting untuk mendorong laju pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja adalah meningkatkan investasi. Peningkatan tabungan kerana implementasi norma-norma konsumsi Islam kapital. Pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar tabungan yang rendah di negara-negara berkembang disalurkan pada usaha-usaha yang tidak produktif, seperti menyimpan emas, batu-batu mulia, dan perhiasan-perhiasan serta *capital flight*.

5) Merancang kembali produksi

Ketika iklim investasi telah membaik maka harus dijamin tidak ada penyelewengan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mewah tidak penting. Kebijakan di Papua harus diarahkan untuk memenuhi barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan. Strategi yang efektif adalah mengubah preferensi masyarakat Papua dengan memberikan motivasi moral dan sosial, untuk menghapuskan rintangan-rintangan dan memberikan insentif dan fasilitas untuk melahirkan komitmen jangka panjang atas dana.

6) Reformasi pertanian dan pedesaan

Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemanfaatan dana desa yang akan dimulai tahun 2015, juga untuk peningkatan kemajuan di sektor pertanian. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua agar dana bantuan desa itu, nantinya tidak saja diperuntukan bagi infrastruktur, tetapi juga untuk membiayai kegiatan pertanian rakyat, supaya memberi kontribusi bagi hasil produksi petani di kampung.

Dana desa yang disalurkan di setiap kampung sekitar Rp1 miliar itu, diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi hasil produksi petani di berbagai kabupaten. Karena itu, momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, sebab program bantuan dari pemerintah pusat tak bakal ada selamanya. Apalagi, sekitar 72 persen masyarakat Papua tinggal di wilayah pedesaan, sehingga sangat penting untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor pertanian di berbagai daerah. Program ini pasti hanya untuk beberapa tahun saja sehingga kita harapkan anggaran ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk peningkatan produktifitas petani di kampung (Selasa, 21 April 2015).⁴⁹

Program ini harus melibatkan petugas penyuluh pertanian, untuk membantu masyarakat kampung mengelola dana desa agar tepat sasaran. Juga harus melibatkan petugas yang ada di

⁴⁹ Dhias Suwandi, "Pemprov Papua dorong pemanfaatan dana desa untuk pertanian", diakses dari <http://papua.antarane.ws.com/berita/449834/pemprov-papua-dorong-pemanfaatan-dana-desa-untuk-pertanian>, pada hari Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

kabupaten/kota, yakni para petugas pertanian untuk mendukung penuh program bantuan desa tersebut agar dananya benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kampung. Dengan adanya dana desa, diharap bisa membantu sektor pertanian di pedesaan yang selama ini kurang mendapat dukungan anggaran.

Pada Juni 2015, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua tercatat mengalami penurunan sebesar 0,09 persen menjadi 96,98 dibandingkan NTP bulan sebelumnya sebesar 97,07. Penurunan tersebut terjadi akibat naiknya indeks harga diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga dibayar petani. NTP Nasional pada Juni 2015 adalah 100,52 atau naik 0,50 persen dibandingkan NTP Mei 2015. Hal ini disebabkan oleh naiknya indeks diterima petani sebesar 1,15 persen dan naiknya indeks harga dibayar petani 0,65 persen.⁵⁰ Program dana desa tersebut lagi-lagi dalam implementasinya belum maksimal karena Papua daerahnya begitu luas.

Programan yang telah dirancang tidak ada artinya tanpa ada reformasika pertanian yang menghapuskan beberapa yang mengurangi efesiensi dan *output* sektor pertanian, meningkat pengangguran di desa, menekan pendapatan di desa, dan

⁵⁰ Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Lihat BPS Papua,. "*Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Bulan Juni 2015*" diakses dari http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150701131700.pdf. pada hari Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 20.07 WIB.

meninggikan ketidakadilan. Dalam hal ini perlu pemenuhan infrastruktur yang efisien dari ekonomi eksternal, seperti fasilitas irigasi dan drainase, pelayanan yang luas, jalan, sekolah, listrik dan kesehatan.⁵¹

7) Menangani pengangguran dengan usaha padat karya

Peningkatan penduduk yang drastis tanpa dibarengi dengan pembangunan ekonomi yang mencukupi dapat menimbulkan banyak kesulitan, maka kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar adalah menciptakan kesempatan kerja. Masalah ini Chapra menyoroti ekspansi permintaan, potensi usaha kecil dan mikro dan peningkatannya.⁵² Di Provinsi Papua UMKM terbanyak terdapat di Kota Jayapura dengan jumlah usaha sebanyak 768 unit, sementara jumlah usaha terkecil terdapat di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 21 unit usaha bahkan terdapat beberapa kabupaten pemekaran yang belum memiliki UMKM. Ini berarti UMKM belum menyebar secara merata masih terfokus di ibu kota provinsi, sehingga perlunya pemerataan UMKM, ini untuk mengurangi pengangguran di pedesaan.

4. Restrukturisasi Keuangan

a. Menjadi penengah yang adil

Dalam sistem perbankan konvensional, adalah tidak rasional meminjamkan jumlah yang banyak kepada masyarakat miskin

⁵¹ M. Umer Chapra, *IEC*,. hlm. 313

⁵² *Ibid.*

sebagaimana yang mereka pinjam kepada kepada orang kaya, atau meminjamkan jumlah sama dalam jangka waktu yang sama kepada masing-masing. Umumnya, yang dilakukan oleh bank adalah meminjamkan hanya kepada individu dan perusahaan yang mempunyai jaminan yang diperlukan. Distribusi kredit yang tidak adil ini merugikan masyarakat karena menyebabkan perekrutan para pengusaha hanya dari satu kelas sosial dan kegagalan masyarakat untuk menggunakan seluruh bakat usaha mereka.⁵³ Sedangkan di Papua perbankan yang syariah hanya 2 bank yaitu BSM dan Muamalah, dengan jumlah kantor cabang 10 unit. Ini yang membuat ketidakadilan dalam penyaluran dana. Pemerintah harus terus mendorong perbankan syariah di wilayah tersebut. Setidaknya 29 kabupaten dan kota di Papua ada satu unit perbankan syariah.

b. Menjadi perantara yang efisien

Dalam sistem perbankan konvensional, sering terjadi alokasi sumber-sumber pendanaan tidak efisien. Dengan menganggap kekuatan jaminan dan membayar buang sebagai pertimbangan sekunder. Akibatnya, kredit dapat digunakan untuk tujuan apa pun, tidak memandang apakah untuk investasi yang produktif atau tidak, yang penting ada jaminannya.

Di sisi penawaran, dengan sistem bagi hasil akan cenderung menjadikan bank bersikap hati-hati dalam mengevaluasi proposal. Dalam hal ini permodalan akan tersedia untuk sektor swasta dan permintaan hanya

⁵³ *Ibid.*, hlm. 328.

untuk proyek produktif. Kemampuan untuk menyediakan jaminan juga tidak menjadi pertimbangan utama.⁵⁴

5. Perencanaan Kebijakan Strategi

Dengan demikian perencanaan ini sangat penting, karena akan menjadikan negara dapat menggunakan perhitungan realisasi mengenai sumber daya fisik dan manusia yang tersedia dan meletakkan seperangkat prioritas yang dirumuskan dengan baik. Ini membantu memberikan arah yang jelas pada kebijakan dan program-program penerimaan serta memulai langkah efektif untuk melahirkan perubahan struktur dan institusional yang diperlukan untuk memungkinkan pemerintah dan swasta memberikan sumbangan yang besar.⁵⁵

Perencanaan sementara ini sulit diwujudkan kecuali jika pemerintah mau menjadikan syariah sebagaimana sumber inspirasi dan kesejatraan semua rakyat, bukan kelompok, sebagaimana komitmennya. Untuk ini, Chapra memberikan beberapa kebijakan ancuhan kebijakan yang harus dilakukan.⁵⁶

- 1) Perencanaan tidak harus menyeluruh, dengan suatu kontrol-kontrol peraturan yang ruwet untuk mencapai keseimbangan seluruh *output* dan *input* dan alokasinya diantara unit-unit kecil dari sektor ekonomi.
- 2) Tidak bersandar kepada pemerintah yang menjadi sumber utama investasi dan usaha.

⁵⁴M. Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adi.*, hlm. 138-150

⁵⁵*Ibid.* hlm. 335

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 336-337

- 3) Menguji pemakaian sumber daya dengan mekanisme filter dan nilai Islam dan memotivasi serta mengaktifkan sektor swasta.
- 4) Melatakan prioritas dalam kerangka kerja syariah untuk menganalisis alokasi sumber daya yang ada untuk arah perubahan.
- 5) Mengklarifikasi barang dan jasa kedalam tiga kategori; kebutuhan, kemewahan dan pertengahan.
- 6) Memotivasi pegawai publik dan pemerintahan untuk bertindak sesuai nilai-nilai Islam.
- 7) Reformasi kebijakan dan institusi untuk menghapuskan ketidakadilan yang ada.
- 8) Menetapkan perubahan struktural yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.

